

Masyarakat

ASEAN

Edisi 21 / April 2019

KEMITRAAN





DAFTAR ISI

4 / PERSPEKTIF

Indonesia dan Kemitraan yang Efektif di ASEAN

9 / PROFIL

ASEAN adalah DNA Kebijakan Luar Negeri Kami

16 / LAPORAN UTAMA

Peran Penting ASEAN dalam Menghadapi Perubahan Lanskap Terorisme

Project 2045 Demi SDGs

Perempuan dan Perdamaian yang Berkelanjutan

26 / LAPORAN KHUSUS

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN - Rusia ke-16

Kemitraan ASEAN – Selandia Baru untuk Pencapaian Sasaran SDGs

32 / REPORTASE

Inspirasi dari *Yamaguchi*



Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN-Rusia ke-16: Tugas Pertama Indonesia sebagai Negara Koordinator



Atraksi Menawan Pengundang Pelancong ke Negeri Gajah Putih

38 / WAWANCARA

Duta Muda: Pemuda
Berperan Penting
di ASEAN

Pemuda Harus Dilihat sebagai Mitra Setara

50 / POJOK SOSIALISASI

Mengintip Beasiswa dari Mitra ASEAN

Menangani Sampah Laut, ASEAN Menolak Diam

60 / POJOK PUSAT STUDI ASEAN ICONAS 2019 Digelar di Universitas Gadjah Mada

Pemuda Islam Sebagai Katalisator dalam
Toleransi dan Moderasi di ASEAN

64 / SERBA-SERBI

Atraksi Menawan Pengundang Pelancong
ke Negeri Gajah Putih

68 / INFOGRAFIS

Pariwisata di Thailand

69 / GALERI FOTO

Seluruh kegiatan

Bagi anda yg ingin menyampaikan tulisan atau
menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran,
silakan kirim melalui email :

tukkasean@kemlu.go.id atau tukkasean@gmail.com



Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Kerja Sama
ASEAN
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja
Sama ASEAN

Redaktur

Basyiruddin Ahmad Hidayat
Bramantya Dewabrata
Firman Sejati

Penyunting/Editor

Bayu P. Oktavriyanto
Fadila Rahmatan Putri
Muhammad Aris Yunandar
Rafhael Riando Rumampuk
Shirley Basauli Agustina
Annisa Khairati
Fransisca Dian Putri K.S
Shofi Nurul Himmah
Endang Susilowati
Thalita Hindarto
Ivorry Chaka Nathara Pranashanti
Eriz Ageng Wicaksono
Syarifah Nadya Mahdini

Desain Grafis/Fotografer

Didi Suparyadi
Geovannie Foresty Palembangan
Olong Philipus Sarwom
Dwi Widayana
Primadiana Sari
Iman Heri Padwono
Tuwuh Ismail

Sekretariat

Ranyndia Niarachma
Betsy Mangudu Malau
Syifa Fauzi A.
Sasi Harianti
Khusnul Khatimah
Yangyang

Alamat Redaksi

Direktorat Jenderal
Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No.6,
Jakarta Pusat
Telp . 021 -3509050 / 3509059
Fax. 021-3509050

Peran Indonesia dalam Memperkuat Kemitraan yang Efektif di ASEAN



Perjalanan ASEAN selama lebih dari 5 dekade telah menghasilkan stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan. Selain itu kerja sama ASEAN juga telah membawa kemajuan ekonomi dan pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan.

Namun demikian, dibalik perkembangan tersebut, ASEAN masih dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya yaitu persaingan pengaruh negara - negara di luar kawasan, kejahatan lintas negara, perang dagang dan proteksionisme. Tantangan tersebut jika tidak dikelola dengan tepat pada akhirnya akan berdampak destruktif bagi kemajuan di kawasan.

Dalam situasi global yang penuh dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh persaingan negara-negara besar di kawasan, ASEAN telah dan akan terus memainkan peran sentral. Melalui Keketuaan Thailand di tahun 2019, ASEAN melihat pentingnya aspek kerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini terlihat dalam prioritas ASEAN yang secara nyata dimaknai dalam tema tahun ini, yaitu *Advancing Partnership for Sustainability*. Dengan situasi seperti ini, lantas bagaimana Indonesia bisa terus mempertegas perannya dalam mendorong kemitraan yang efektif bagi ASEAN ditengah tantangan global yang ada?

Memahami Prioritas Kemitraan di ASEAN

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu pemahaman bagaimana ASEAN secara kolektif memandang tantangan ini. Dalam pidato pada the 13th East Asia Summit, Perdana Menteri Thailand telah menyampaikan bahwa melalui keketuaan Thailand, ASEAN akan fokus pada 3 (tiga) komponen yang memiliki arti penting dalam prioritas kemitraan ASEAN di tahun 2019.

Komponen pertama adalah "Advancing", untuk menuju visi Digital ASEAN yang future-oriented. Komponen ini dimaknai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dari Revolusi Industri 4.0, meningkatkan daya saing dan menciptakan sistem imunitas terhadap dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi maupun tantangan di masa depan.

Komponen kedua adalah "Partnership" yang menitikberatkan penguatan kerja sama arsitektur regional yang mengedepankan ASEAN-led dan ASEAN-centred mechanism. Dalam kaitan ini, kerja sama ekonomi bersama mitra global akan diperkuat dengan dasar saling menguntungkan dan kepentingan umum. Selain itu, ASEAN juga akan terus meningkatkan perannya di panggung internasional guna menghadapi isu global seperti perubahan iklim. Elemen penting dari komponen partnership adalah peningkatan konektivitas di berbagai dimensi, baik infrastruktur, peraturan hukum, konektivitas antar masyarakat, dan konektivitas strategis lainnya di kawasan agar tercapainya Seamless ASEAN.

Komponen ketiga yaitu "Sustainability", menitikberatkan pada kesinambungan dalam berbagai sektor, diantaranya keamanan (sustainable security), ekonomi (green economy), maupun pembangunan (sustainable development).

Kata kunci dari tema tersebut adalah kemitraan yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, berkesinambungan juga berarti mendorong Negara Anggota ASEAN, masyarakat dan semua sektor di dalamnya untuk mengambil tindakan kolektif guna menciptakan “ASEAN Brand” agar menambah nilai strategis dan menguatkan identitas dan sentralitas masyarakat tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Hal ini perlu dimaknai secara mendalam bahwasannya dalam kemitraan, semua pihak harus dapat saling menguntungkan. ASEAN yang saat ini telah menjadi ekonomi ke-6 terbesar di dunia (ekonomi ke-4 terbesar di tahun 2030), harus dapat memastikan bahwa pengembangan kemitraan seyogianya juga memperkecil disparitas di antara negara anggota ASEAN dan mitra, baik dalam segi pembangunan, ekonomi dan keamanan.

Indonesia sebagai *primus inter pares* di ASEAN tentu telah membawa semangat yang sama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi seperti persaingan politik dan dagang, teknologi yang disruptif, kejahatan lintas negara, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, Indonesia tetap percaya bahwa kemitraan yang berasaskan kerja sama yang saling menguntungkan adalah salah satu solusi utama.

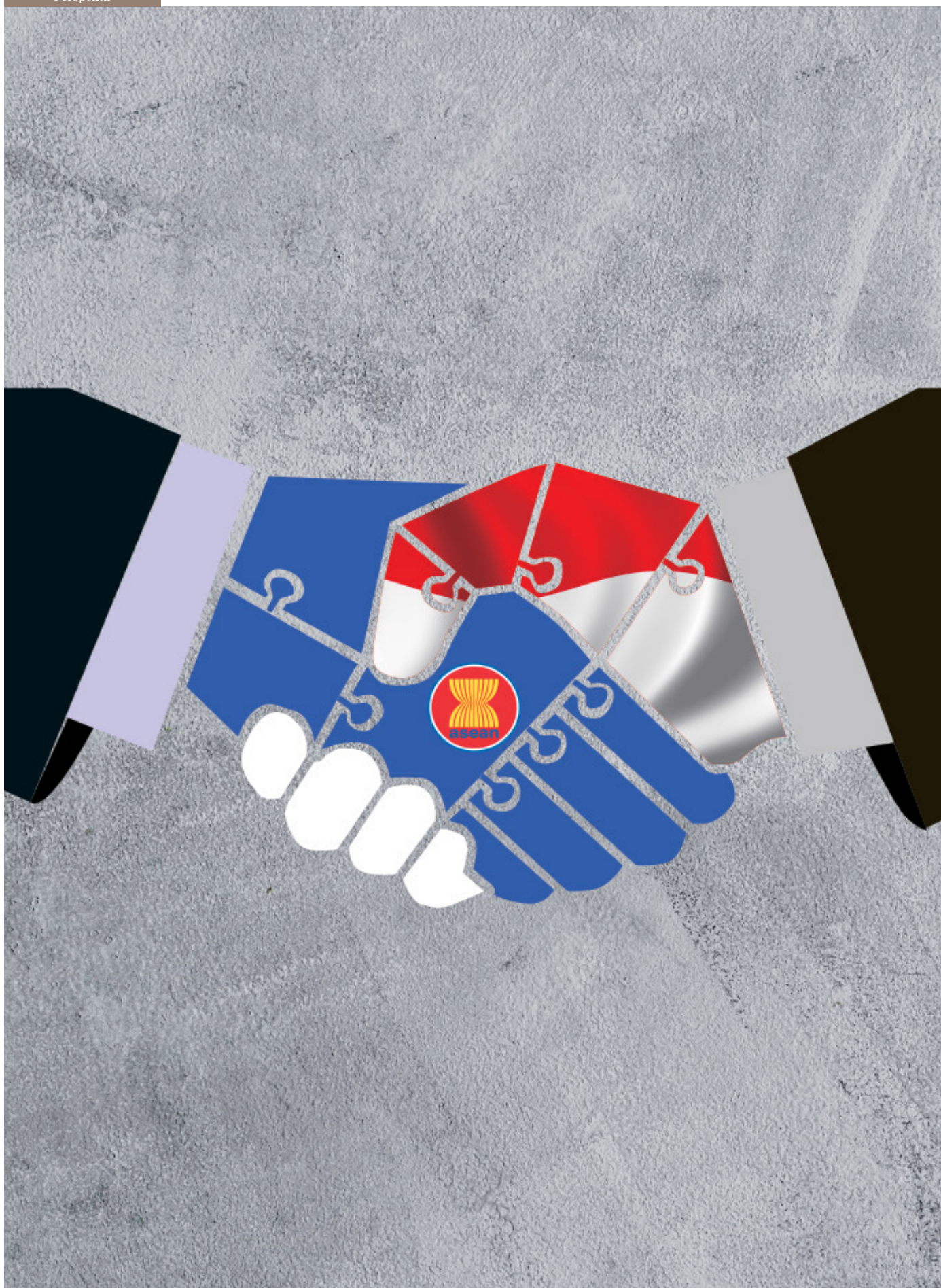
Hingga saat ini, ASEAN telah membangun kemitraan dengan berbagai organisasi regional dan internasional seperti dengan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan prioritas dan kepentingan bersama. Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN telah membentuk suatu kemitraan komprehensif yang mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, promosi demokrasi dan HAM, pembangunan, ekonomi dan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) serta perubahan iklim. Kemitraan komprehensif juga menjadi wadah bagi Badan-Badan PBB dalam mendukung pencapaian Masyarakat ASEAN. Salah satu langkah konkret kerangka kemitraan ASEAN-PBB diantaranya yaitu penyelenggaraan konsultasi secara regular ASEAN-PBB dalam membahas dan menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Kegiatan kemitraan lainnya antara ASEAN-PBB yaitu

penyelenggaraan Regional Dialogue on Political-Security Cooperation (AURED) ASEAN-UN setiap tahun.

Dalam hal perdagangan, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah langkah kemitraan strategis yang saat ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan perdagangan internasional, terlebih dengan adanya perang dagang antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat. RCEP yang lahir dari mekanisme ASEAN+1 FTAs, merupakan komitmen antara 16 negara (10 Negara Anggota ASEAN dan enam Negara Mitra ASEAN yaitu Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru) yang menggabungkan lebih dari 50% populasi dunia, 30% GDP dunia dan berkontribusi terhadap 1/4 perdagangan yang ada.

Indonesia sebagai bagian dari RCEP tentu saja dapat memanfaatkan besarnya potensi kerja sama ini. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah mempersiapkan diri dengan merevitalisasi sektor manufaktur melalui *visi Making Indonesia 4.0*. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam catur perdagangan RCEP. Selain itu ASEAN sebagai kesatuan dalam kesepakatan ini harus menghadapi enam negara mitra secara individual dengan kepentingan yang berbeda-beda serta dengan tingkat kemajuan teknologi dan kesiapan infrastruktur yang juga berbeda. Baik Indonesia maupun ASEAN secara kesatuan harus mampu mempersiapkan strategi untuk dapat memastikan kemitraan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Di sisi lain, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, Negara Anggota ASEAN wajib menyesuaikannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini kemitraan ASEAN sebagai arsitektur regional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangatlah penting untuk mencapai tujuan ini. Lebih lanjut usaha untuk menyandingkan ASEAN Community Vision 2025 dan the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development adalah bentuk nyata komitmen



kemitraan yang kuat. Komitmen ini dapat lahir tentunya karena melihat bahwa keduanya dapat saling melengkapi. Memperhatikan unsur-unsur kerangka kerja yang saling melengkapi serta panduan operasional, terdapat 5 (lima) bidang prioritas yang telah diidentifikasi: pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, produksi yang berkelanjutan dan konsumsi, serta ketahanan. Area-area prioritas ini bersifat saling berkaitan, yang artinya mengatasi salah satunya dapat menyebabkan pengentasan berbagai masalah yang saling terkait dan lintas sektoral.

Kemitraan ini, lebih lanjut perlu untuk diharmonisasikan ke dalam strategi nasional. Indonesia sendiri termasuk *champion* dalam hal pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2000, angka kemiskinan di Indonesia mencapai hampir 40 juta penduduk dan menurun hingga kurang dari setengahnya di tahun 2015. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia telah turun hingga 9,82%, terendah sejak tahun 1998. Indonesia juga menunjukkan kemajuan paling substansial dalam mengurangi kemiskinan absolut. Hal ini tentu dampak besar pada keseluruhan jumlah orang yang tergolong sangat miskin di kawasan ASEAN. Dengan demikian, Indonesia memiliki andil kuat dalam mencapai tujuan kerja sama di ASEAN. Kesuksesan ini dapat juga menjadi *best practices* di kawasan dengan permasalahan yang serupa. Semua ini adalah hasil kesuksesan dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan melalui kemitraan yang diterapkan Indonesia.

Lebih lanjut, kemitraan yang strategis juga diperlukan untuk mendukung konektivitas dalam berbagai dimensi. Dengan fokus pada konektivitas fisik, konektivitas institusional dan konektivitas antar masyarakat sesuai dengan ASEAN Connectivity Masterplan 2025, ASEAN memerlukan sumber pendanaan dan model konektivitas regional yang dapat menjadi mitra. Uni Eropa (UE) adalah mitra strategis yang memiliki nilai tambah dalam kerja sama ini. Dalam kaitan ini, upaya nyata yang dilakukan adalah saling berbagi pengalaman dan *best*

practices baik dari UE dan ASEAN, juga dengan inisiatif konektivitas sub-regional dan trans-regional seperti the Mekong sub-region, Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Dalam hal kemitraan di bidang konektivitas kawasan, Indonesia tentu memiliki andil besar. Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa negara kepulauan sangat mengandalkan konektivitas sebagai aspek vital yang dapat memperkuat ekonomi serta pemerataan pembangunan. Dengan *political will* yang tercermin dari semangat untuk menjadi Poros Maritim Dunia, Indonesia dipastikan berperan besar dalam menghubungkan konektivitas internal yang sangat luas dengan konektivitas kawasan yang lebih beragam.

Dengan semangat dialog dan kerja sama, Indonesia terus mendorong kerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan Indonesia yang terhubung langsung dengan wilayah negara anggota ASEAN lainnya. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan pengembangan 4 Koridor Ekonomi Terintegrasi (di kawasan Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali) yang dapat menghubungkan kawasan domestik Indonesia yang luas dengan kawasan ASEAN. Dalam usaha ini, Indonesia selalu menggandeng dan bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN seperti RRT, Jepang dan Korea Selatan.

Peran Indonesia Dalam Memperkuat Kemitraan di ASEAN

Peran kuat Indonesia juga tercermin dari upayanya membawa sentralitas ASEAN dalam percaturan geopolitik kawasan. Meskipun terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan dalam menjalin kerja sama dengan mitranya, ASEAN masih berjuang menghadapi tantangan geopolitik di kawasan. Dinamika geopolitik dan ketidakpastian dalam sistem global yang saat ini sedang terjadi telah berpengaruh terhadap situasi keamanan di ASEAN. Tak dapat disangkal bahwa negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, RRT, India, Jepang, Australia, dan Rusia memiliki kepentingan yang besar di kawasan.

Secara terbuka, salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan adalah konsep tentang kerja sama di kawasan Indo-Pasifik dimana negara-negara ASEAN berada tepat di pusat kawasan yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera pasifik. Untuk menghindari ASEAN menjadi battleground beberapa kekuatan besar, Indonesia saat ini sedang mendorong Indo-Pacific Outlook sebagai sebuah konsep bersama di ASEAN.

Konsep Indo-Pacific Outlook adalah sebuah bentuk kerja sama yang mengedepankan inklusifitas dengan menggunakan ASEAN-led mechanism yang sudah ada sebelumnya seperti East Asia Summit (EAS) sebagai platform-nya. Beberapa tujuan penting dari konsep Indo-Pacific Outlook adalah antara lain untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik kawasan yang terintegrasi dan saling berhubungan; menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang mengedepankan kerja sama efektif; menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan pembangunan dan kemakmuran bagi semua pihak (development and prosperity for all); dan mengedepankan perspektif domain maritim dalam arsitektur regional yang terus berkembang.

Adapun beberapa wilayah kerja sama prioritas yang ingin didorong Indonesia antara lain adalah kerja sama maritim, konektivitas, dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Melalui Indo-Pacific Outlook, Indonesia tidak akan berhenti untuk terus bekerja menemukan kerangka kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan di ASEAN dan negara mitra ASEAN. Selain itu, upaya ini tentu saja sejalan dengan semangat keketuaan Thailand di ASEAN untuk memajukan kemitraan demi keberlanjutan di berbagai bidang.

Kemitraan yang efektif didasarkan pada saling percaya dan terbuka. Hal ini menjadi kunci bagi ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengurai prioritas keketuaan Thailand melalui tema yang diajukan serta usaha Indonesia mengedepankan sentralitas ASEAN dalam konsep kerja sama yang ditawarkan, jelas tergambar pentingnya kemitraan dalam mencapai tujuan dan visi ASEAN. Usaha ini tentunya dapat berbuah karena sejalan dengan

arah kebijakan Indonesia. Dengan demikian sangatlah tepat bagi Indonesia untuk dapat fokus dalam mendorong terjalinnya kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan tanpa meninggalkan pihak manapun.

Disamping itu, dalam hal kemitraan ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan dan dengan organisasi internasional, Indonesia telah turut berkontribusi. Dalam kerja sama lintas pilar masyarakat ASEAN, Indonesia telah berperan penting dalam pembentukan visi Masyarakat ASEAN. Indonesia juga merupakan penggagas visi kemitraan ASEAN dengan negara mitra dan organisasi internasional yang tertuang dalam Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations "Bali Concord III". Bali Concord III adalah manifestasi dari penjangkauan global ASEAN untuk berkontribusi di tingkat global dengan cara yang lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren. Visi tersebut mencerminkan komitmen ASEAN untuk meningkatkan peran dalam mengatasi tantangan global dengan meningkatkan kolaborasi antar Negara Anggota ASEAN untuk mengadopsi posisi bersama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di forum regional dan internasional. Secara spesifik komitmen tersebut merupakan yang pertama menggambarkan outward looking ASEAN sebagai entitas yang solid dalam memandang pentingnya kemitraan yang kuat.

Dengan kesadaran akan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan, Indonesia telah dan akan terus memainkan peranan penting dalam mendukung peningkatan kemitraan yang efektif di ASEAN.

Oleh:
M. Chandra W. Yudha
(Direktur Kerja Sama Politik-Keamanan ASEAN)

ASEAN ADALAH DNA KEBIJAKAN LUAR NEGERI KAMI



**Wakil Tetap Kerajaan Thailand untuk ASEAN,
Duta Besar Phasporn Sangasubana**

Tim Majalah Masyarakat ASEAN menyambangi kantor Wakil Tetap Kerajaan Thailand untuk ASEAN, Duta Besar Phasporn Sangasubana, pada Senin pagi (22/03/2019) untuk mengetahui perjalanan kariernya sebagai Ketua Komite Perutusan Tetap ASEAN dan memperoleh gambaran mengenai berbagai prakarsa yang diajukan oleh Thailand sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2019. Tak lama menunggu, Duta Besar Sangasubana melemparkan senyuman hangat kepada Tim MMA sebelum memulai kisahnya.

Duta Besar Sangasubana mengatakan sehari-hari ia memang biasa datang ke kantor lebih pagi agar dapat lebih berkonsentrasi dalam bekerja. “Dan biasanya banyak hal yang harus saya lakukan sejak pagi,” kata dia.

Kegiatan di kantornya sebenarnya dimulai pukul 10.00 WIB, tapi ia sering kali harus mengikuti rapat di kantor Sekretariat ASEAN pada pukul 09.00. Setiap bulan, 1-2 kali ia juga menyelenggarakan rapat staf pada pukul 08.30. “Sebenarnya saya cukup fleksibel mengenai jam kedatangan para staf di kantor, terutama mempertimbangkan bahwa diplomat kami bisa dibidang bekerja 24 jam sehari,” ujarnya, tersenyum.

Duta Besar Sangasubana mengatakan stafnya memiliki tugas beragam tapi, karena tahun ini Thailand adalah Ketua ASEAN, pihaknya harus memimpin Komite Perutusan Tetap ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN. “Biasanya saya akan mengadakan rapat kira-kira selama dua jam untuk tim kami di pagi hari sebelum menyelenggarakan rapat untuk Komite Perutusan Tetap ASEAN,” tuturnya.

ASEAN Selalu di Hati Saya

Duta Besar Sangasubana mengenang perjalanan 32 tahun kariernya sebagai Diplomat. Ia bergabung dengan Departemen ASEAN di Kementerian Luar Negeri Kerajaan Thailand pada 1987. Di tahun yang sama, Thailand menjadi tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan ASEAN Post Ministerial Conference (PMC), yang saat itu telah berjalan tiap tahun. Pada saat itu, sebagai diplomat muda, ia tidak benar-benar mengerti tentang ASEAN. Namun seiring berjalannya waktu, melalui berbagai penugasan terkait dengan urusan ASEAN, ia melihat ASEAN sangat penting. Misalnya, saat kolega senior menugaskan dia menyiapkan berbagai dokumen resmi yang diperlukan dalam pertemuan AMM/PMC. “Wah, saat itu sulit sekali rasanya karena saya tidak benar-benar paham apa inti dari pertemuan tersebut. Jadi, saya mencoba mempelajari dan memahami agenda yang akan diangkat dalam pertemuan agar saya

dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan baik.”

Saat ditanya ihwal pengalamannya yang paling menarik sebagai diplomat, ia mengatakan telah menyaksikan dan merasakan sendiri perkembangan kerja sama ASEAN dari masa ke masa. Menurut dia, diplomasi berhasil membuat ASEAN lebih relevan. Duta Besar Sangasubana mencontohkan bagaimana ASEAN menanggapi krisis Kamboja pada 1987. Pada saat itu, ASEAN berupaya memainkan perannya sebagai perantara untuk menyelesaikan krisis Kamboja. Saat itu, kata dia, masing-masing negara anggota ASEAN berbagi tugas sesuai dengan kekuatan masing-masing anggota. Misalnya, mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Vietnam, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja berperan penting sebagai pembuka jalan untuk menghubungkan ASEAN dengan Vietnam. “Thailand berperan sebagai penghubung antara ASEAN dan pemangku kepentingan lain, khususnya mitra eksternal seperti Prancis dan PBB,” katanya. Menurut dia, pada saat itulah untuk pertama kalinya sejak dibentuk pada 1967, ASEAN bersatu untuk mengatasi permasalahan politik yang mereka hadapi.

Ia menyampaikan terbentuknya Piagam ASEAN melalui diplomasi negara anggotanya pada 2008 juga menjadi penanda kemajuan kerja sama ASEAN. ASEAN telah melalui perjalanan panjang hingga akhirnya menjadi organisasi yang berdasarkan pada aturan (*ruled-based organization*), yang dihormati oleh pihak lain di luar kawasan dan diakui sebagai organisasi internasional.

Perjalanan Duta Besar Sangasubana dengan ASEAN terus bergulir saat ia menjabat Direktur Kerja Sama Politik-Kemampuan ASEAN pada 2009, tahun yang sama saat Thailand menjadi Ketua ASEAN. Ia merasa senang karena bisa mengalami secara langsung bagaimana negara anggota ASEAN berupaya menegosiasikan pembangunan Masyarakat ASEAN melalui tiga pilarnya. “Saya salah seorang yang bernegosiasi bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya

untuk mencapai hal ini.”

Menurut dia, Thailand menghadapi tantangan cukup serius ketika menduduki kursi Ketua ASEAN pada 2009, yaitu untuk mengenalkan Piagam ASEAN kepada masyarakat internasional. Pada tahun yang sama, Komite Perutusan Tetap ASEAN dibentuk dan menyelenggarakan pertemuan pertamanya. Ia pun menyampaikan antusiasmenya untuk berkontribusi lebih lanjut sebagai Wakil Tetap Kerajaan Thailand untuk ASEAN guna mendorong kerja sama ASEAN di bawah Keketuaan Thailand di tahun ini.

Tahun ini adalah peringatan sepuluh tahun terbentuknya Komite Perutusan Tetap ASEAN. “Saat pembangunan Masyarakat ASEAN pada 2015, kami mendorong terbentuknya Masyarakat ASEAN yang berpusat pada rakyat. Oleh karena itu, pada 2019 ini Komite Perutusan Tetap ASEAN berupaya membuat ASEAN lebih relevan bagi masyarakat,” ucapnya.

Salah satu hasil dari pertemuan pada Januari lalu, kata dia, adalah komitmen untuk membuat kehadiran Komite Perutusan Tetap ASEAN lebih dikenal kalangan pemuda, salah satunya melalui penyelenggaraan ASEAN *Lecturedi* Chiang Mai dan Chiang Rai, yang pada saat itu bersamaan dengan pertemuan ASEAN yang penting di Thailand. “Kami juga berencana menyelenggarakan kegiatan serupa di Indonesia, kemungkinan besar di Jakarta, tapi bila memungkinkan akan dilaksanakan juga di luar Jakarta. Sejauh ini ASEAN Lecture Series di Indonesia diselenggarakan di Universitas Indonesia pada 4 April 2019.

Duta Besar Sangasubana menambahkan diplomasi memiliki peran penting dalam menyatukan ASEAN pada saat krisis dan meneruskan budaya konsensus ASEAN. Ketika bergabung di Departemen ASEAN pada 1987, ia tidak paham mengapa konsensus harus dilakukan dan mengapa konsensus sangat penting. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya mengerti sejatinya konsensus merupakan kekuatan yang menyatukan ASEAN. Pihak di luar kawasan, terutama mitra eksternal pun

menghormati budaya konsensus di ASEAN. Di sisi lain, ASEAN juga memperoleh kritik dan tantangan, terutama dari kalangan akademik. "Namun mereka pada akhirnya menyadari bahwa seiring dengan berjalannya kerja sama ASEAN selama 51 tahun, konsensus merupakan bagian yang sangat penting di dalamnya."

Ia menuturkan diplomasi juga memiliki peranan penting untuk membuat ASEAN lebih relevan bagi masyarakat. Kerja sama ASEAN telah berjalan selama 51 tahun, dimana pembuatan kebijakan dilakukan di tingkat pimpinan dan dilakukan oleh para diplomat. "Namun sepertinya kita belum benar-benar menyentuh masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, melalui pembangunan Masyarakat ASEAN, kami berharap suara masyarakat dapat lebih didengarkan."

Ia menambahkan Sekretariat Nasional ASEAN di tiap negara anggota ASEAN juga telah melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran ASEAN di berbagai sekolah dan universitas. Beberapa universitas bahkan telah memiliki kursus/kelas tentang ASEAN. "Saya berharap generasi muda dapat meneruskan ASEAN untuk 50 tahun mendatang. Di masa mendatang saya akan turut mengamati, membantu memelihara, dan mempromosikan ASEAN kepada generasi penerus serta membuat ASEAN menjadi bagian dari keseharian mereka. Jadi seperti inilah pengalaman saya sebagai seseorang yang mulanya tidak tahu sama sekali tentang ASEAN hingga memperoleh berbagai kesempatan untuk turut terlibat dalam perkembangan ASEAN," ujar dia.

Pengalaman-pengalaman tersebut telah membantunya menumbuhkan ASEAN dalam hatinya. Pengalaman tersebut juga membantunya memberikan kontribusi dalam mempromosikan identitas dan kewarganegaraan ASEAN di masa mendatang.

Arti ASEAN bagi Thailand

Thailand tidak saja dikenal sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Deklarasi ASEAN yang menjadi dasar pembentukan ASEAN

pun ditandatangani di Bangkok. Menjawab pertanyaan Tim MMA soal arti ASEAN bagi Thailand dan bagaimana Thailand memandang masa depan kerja sama ASEAN, Duta Besar Sangasubana mengatakan, sejak pembentukannya pada 1967, ASEAN adalah inti dari kebijakan luar negeri Thailand. Fondasi ini dibangun terutama melalui kepemimpinan Dr. Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand kala itu, yang dikenal sebagai salah seorang pendiri ASEAN.

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Thailand menganggap ASEAN sebagai bagian dari DNA kebijakan luar negerinya. Duta Besar Sangasubana menjelaskan selama 1990-an, terutama setelah krisis Kamboja, ASEAN berfokus pada pembangunan ekonomi di kawasan. "Misalnya, melalui pengenalan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada masa pemerintahan Perdana Menteri Anand Panyarachun, yang juga berpengalaman sebagai sekretaris Dr. Thanat Khoman di masa awal pembentukan ASEAN. Jadi, ASEAN pun begitu lekat dalam hati beliau." Tidak hanya mengajukan usulan mengenai pembentukan AFTA, Thailand juga mengenalkan konsep Konektivitas ASEAN pada 2009.

Ia berharap semangat ASEAN sebagai DNA kebijakan luar negeri Thailand dapat terus dilanjutkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itulah, ia berharap dapat melanjutkan DNA ini, terutama melalui berbagai forum interaksi yang telah diprakarsai sebelumnya, seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), forum kepemudaan ASEAN, serta forum komunikasi dengan berbagai ormas ASEAN. "Kita akan terus mengupayakan hal ini dan membuat para pemimpin kita mendengarkan, dan bila memungkinkan, memberikan arahan atau memahami apa saja yang menjadi perhatian dan tantangan bagi para pemangku kepentingan pada aspek pembuatan kebijakan." kata dia. Ia yakin dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN, kita perlu berfokus pada masyarakat dan mendorong agar suara serta aspirasi masyarakat dapat lebih terdengar. Ini

aspek lain yang ingin terus didorong dalam kebijakan luar negeri Thailand, begitu pula pada masa keketuaan Thailand di ASEAN pada tahun ini.

Keketuaan Thailand 2019: Advancing Partner for Sustainability

Pada keketuannya tahun ini, Thailand mengusung tema "Advancing Partnership for Sustainability". Menurut Duta Besar Sangasubana, tiap kata dalam tema tersebut memiliki signifikansi. Advancing berarti ASEAN perlu melihat ke depan, tidak hanya berhenti pada berbagai target yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru ASEAN 2025. Ia mencontohkan salah satu prakarsa Thailand adalah ekonomi digital sebagai bagian penting dalam peningkatan daya saing negara anggota ASEAN dalam menjawab berbagai tantangan di era Revolusi Industri 4.0. "Pada Januari lalu, kami bersama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan simposium tentang ekonomi digital dan Revolusi Industri 4.0. Dalam kegiatan ini, sepuluh negara anggota ASEAN membahas bagaimana kita dapat menanggulangi berbagai tantangan yang ada secara bersama-sama. "Kegiatan ini akan dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu setahun, selama periode keketuaan Thailand. Ia merasa Vietnam pun akan melanjutkan prakarsa terkait isu digital karena sangat penting bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Ia mengatakan kata partnership menjadi elemen penting. Partnership berarti mewujudkan strategic trust – secara internal di ASEAN dan di luar kawasan ini – untuk memastikan keberlangsungan kerja sama ASEAN. Pembentukan strategic trust di dalam ASEAN paling tidak harus dilakukan dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah antar anggota ASEAN agar pemajuan Masyarakat ASEAN dapat terus dilakukan. "Kami ingin kerja sama yang kita bangun melalui ASEAN dapat terukur serta relevan dengan kawasan dan masyarakat." Tingkatan selanjutnya adalah pada tataran masyarakat, yakni bagaimana membangun *strategic trust* sehingga

masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintah dan sebaliknya kepercayaan pemerintah terhadap masyarakatnya.

Dengan adanya dasar kepercayaan yang kuat, akan lebih mudah saling menghubungkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (Connecting ASEAN). Mengenai hal ini, ia menekankan kembali pentingnya memajukan strategic trust antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan ASEAN dan para pihak di lapangan, terutama pentingnya menciptakan suatu platform untuk mengadvokasi kebutuhan para pihak di lapangan agar dapat menyalurkan aspirasinya. "Saya berharap, sejalan dengan perkembangan Masyarakat ASEAN, suatu saat kita dapat menyatukan pihak-pihak ini di meja negosiasi dalam waktu 50 tahun mendatang."

Ia mengingatkan soal tantangan untuk mewujudkan upaya ini. Menurut dia, tantangan sebenarnya tidak datang dari kawasan ASEAN, melainkan di luar kawasan. Misalnya mengenai Kebangkitan China, hubungan Indo-Pasifik, dan berbagai prakarsa mengenai konektivitas di luar kawasan ASEAN. Oleh karena itu, kata dia, Thailand ingin menjembatani *strategic trust* antara negara anggota ASEAN dan mitra eksternal. "Kami sedang melakukan upaya-upaya tersebut saat ini, terutama, misalnya, dengan mendukung prakarsa Indo-Pasifik yang awalnya diajukan oleh Indonesia," ucapnya.

Sebagai Ketua ASEAN di tahun ini, Thailand setuju ASEAN perlu memiliki pendekatan bersama dalam hal Indo-Pasifik. Hal ini bukan berarti ASEAN bereaksi terhadap berbagai prakarsa lain di luar kawasan, tetapi terlebih karena ASEAN menginginkan adanya suatu kerja sama yang terukur dimana ASEAN merasa cukup nyaman mengupayakan berbagai prakarsa yang ada, bersama dengan mitra eksternal. "Oleh karena itu, bisa saya katakan bahwa sebenarnya kita justru sudah *go beyond* dari signifikansi politis Indo-Pasifik, karena kita ingin kerja sama ini dapat lebih terukur untuk masyarakat juga."



ASEAN THAILAND 2019

ADVANCING PARTNERSHIP
FOR SUSTAINABILITY

Menurut dia, sangat penting memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari kerja sama, terutama mengingat pada awal pembentukannya investasi terbesar ASEAN adalah perdamaian dan kemakmuran kawasan yang seiring dengan berjalannya waktu semakin dilupakan oleh masyarakat. Padahal perdamaian dan kemakmuran kawasan merupakan elemen penting untuk terus mendorong pembangunan kawasan, baik pembangunan politik, ekonomi, maupun sosial.

Duta Besar Sangasubana menjelaskan konsep terakhir dalam tema Keketuaan Thailand tahun ini, yaitu sustainability/sustainable ASEAN. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa Thailand tidak sepenuhnya menciptakan prakarsa-prakarsa baru karena ingin memastikan keberlanjutan berbagai prakarsa yang telah diajukan oleh negara anggota ASEAN lain dalam masa-masa keketuaan sebelumnya. "Pada 2017, Filipina telah mengajukan berbagai prakarsa terkait kemitraan, lalu pada 2018 Singapura mengajukan prakarsa dengan tema terkait ketangguhan dan inovasi. Thailand

ingin berbagai tema dan prakarsa ini dapat dilanjutkan secara berkesinambungan. Fokus kami yaitu untuk memiliki suatu *people-centered community*. Saya yakin Ketua ASEAN di tahun depan, Vietnam, juga akan melakukan hal yang sama."

Prakarsa Thailand secara lebih lanjut dapat ditemukan dalam tiap Pilar ASEAN. Dalam Pilar Politik-Keamanan ASEAN, misalnya, Duta Besar Sangasubana menekankan pentingnya penanggulangan masalah kejahatan lintas negara dalam segala dimensi. Dalam hal ini, ia menyampaikan pentingnya mendorong skema pengelolaan batas wilayah yang lebih baik dan efektif, tidak saja di wilayah darat, tetapi juga di wilayah laut dan udara. Menurut dia, pengelolaan batas wilayah akan memberikan dampak pula terhadap kehidupan masyarakat, misalnya dari aspek ekonomi.

Dalam Pilar Ekonomi ASEAN, Thailand mengajukan agar ASEAN dapat menyelesaikan tahap akhir untuk operasionalisasi ASEAN Single Window (ASW). Thailand juga akan mendorong konklusi dalam pembahasan Regional



Comprehensive Economic Partnership (RCEP). "Ini bukan berarti untuk penandatanganannya ya, karena untuk penandatanganan RCEP sendiri sifatnya memang sangat teknis. Dalam masa Keketuaan Thailand ini kami ingin mendorong agar negosiasi RCEP dapat mencapai konklusi, paling tidak ini dapat digunakan sebagai pendekatan untuk kick-off RCEP."

Duta Besar Sangasubana menyampaikan Thailand cukup banyak memberikan masukan dalam Pilar Sosial-Budaya dalam masa keketuaannya. Hal ini terutama terkait dengan penyampaian usulan kelembagaan baru, yaitu *ASEAN Centre on Dialogue Studies on Sustainable Development* yang diharapkan dapat diluncurkan saat KTT ASEAN berlangsung pada November 2019. Menurut dia, Thailand sedang melakukan upaya di tataran lapangan agar para pemangku kepentingan lebih memahami tujuan dan manfaat dari lembaga ini. ASEAN Centre on Dialogue Studies on Sustainable Development akan berfokus pada berbagai penelitian untuk memajukan isu Pembangunan Berkelanjutan di kawasan. Negara anggota ASEAN dan mitra eksternalnya akan berupaya melakukan kerja sama melalui lembaga ini, dengan

mempertimbangkan kekuatan masing-masing negara pada berbagai isu. Ia mencontohkan salah satunya adalah rencana kerja sama dengan Kanada--salah satu Mitra Wicara ASEAN--untuk memajukan isu pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, terutama dalam hal pengelolaan bencana.

Lembaga kedua yang diusulkan oleh Thailand adalah ASEAN Center of Active Ageing and Innovation. Menurut dia, berbagai upaya di lapangan telah dilakukan, terutama melalui sektor kesehatan ASEAN. Lembaga ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada Juni 2019. Fokus utamanya adalah pendekatan terhadap *ageing societies* agar kelompok masyarakat ini tidak semata dilihat sebagai beban, tetapi dengan memanfaatkan inovasi dan perkembangan teknologi, *ageing societies* dapat memberikan pula kontribusi bagi ASEAN.

Meningkatkan Peranan ASEAN di Tingkat Global

Ketika membahas tentang peranan ASEAN dalam penyelesaian berbagai isu, baik di tingkat kawasan maupun internasional, Duta Besar Sangasubana menyampaikan bahwa ada dua elemen yang harus menjadi fokus ASEAN,



yaitu implementasi kebijakan dan ASEAN yang koheren. "Jangan sampai kita hanya membuat ASEAN sekedar talkshop. ASEAN bukan tempat dimana seluruh negara anggotanya bertemu secara reguler tapi lalu melupakan hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut," ujarnya.

Negara anggota harus membuat ASEAN sebagai bagian dari implementasi kebijakan dan tindakan yang koheren untuk diterjemahkan di berbagai tataran, agar negara anggota memiliki suara dan pemahaman yang sama tentang ASEAN. Suara dan pemahaman ini perlu diterjemahkan kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga mereka benar-benar paham makna sejati dari ASEAN dan apa yang dilakukan pada tataran kebijakan.

Duta Besar Sangasubana juga menekankan kembali bahwa sangat penting mengangkat isu-isu yang menjadi prioritas masyarakat dalam berbagai pembahasan di ASEAN agar masyarakat dapat melihat relevansi dari

berbagai perkembangan konstelasi global dengan kepentingan mereka. Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kesempatan menyuarakan aspirasinya dalam tataran kebijakan sehingga dapat terlibat dan memberikan kontribusi dalam perjalanan kerja sama ASEAN sekarang dan di masa mendatang.

Oleh:

Ivorry Chaka Nathara Pranashanti

Syarifah Nadya

(Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN)

PERAN PENTING ASEAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LANSKAP TERORISME

Perubahan Lanskap Terorisme

Serangan teroris yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru, 15 Maret 2019 kembali menghenyakan masyarakat internasional mengenai bahaya terorisme di seluruh dunia. Berdasarkan telaahan, aksi terorisme global beberapa waktu terakhir ditandai dengan adanya perubahan pola aktivitasnya. Perubahan pola aktivitas terorisme global ini semakin memperkuat peran penting organisasi regional dalam penanggulangan terorisme. Kemunculan kelompok teroris Islamic State (IS) pada tahun 2014 di Irak dan Suriah menggantikan Al Qaeda sebagai jaringan teroris terbesar di dunia menimbulkan beberapa perubahan dalam pola pergerakan kelompok teroris. Perubahan yang dilakukan IS tersebut menyebabkan organisasi regional memiliki peran sentral dalam menghadapi ancaman jaringan IS.

Kemunculan IS telah menimbulkan fenomena baru yakni timbulnya Foreign Terrorist Fighters (FTF). Sekitar 40 ribu individu dari 120 negara telah menyeberang ke Irak dan Suriah¹. Sekitar 80% dari jumlah tersebut kemudian bergabung dengan IS sebagai FTF². Bergabungnya anggota teroris dari luar Irak dan Suriah mengakibatkan kekuatan ISIS menjadi sekitar 100 ribu orang jika ditambah anggota IS yang sudah ada di Irak dan Suriah³.

Dalam mendukung klaim sebagai khalifah Islam global, IS kemudian mengumumkan pembentukan provinsi (wilayah) di luar Irak dan Suriah. Provinsi-provinsi tersebut berada di wilayah Timur Tengah, Afrika, Kaukasus dan Asia dimana di masing-masing provinsi tersebut telah ada organisasi teroris lokal yang berafiliasi dengan IS⁴. Sebagaimana Al Qaeda, internet juga secara masif digunakan IS, tidak hanya untuk merekrut namun juga

untuk merencanakan dan memberikan perintah serangan teror. IS menggunakan sosial media untuk menyebarkan propaganda⁵. Propaganda tersebut menghasilkan apa yang dikenal dengan sebutan "lone wolf" yaitu individu atau organisasi tidak memiliki hubungan langsung dengan IS namun bersimpati dan menyatakan secara sukarela menjadi bagian dari IS⁶.



¹Paul Cruickshank, "A View from The CT Foxhole: Lisa Monaco, Former Assistant to President Barack Obama for Homeland Security and Counterterrorism", CTC Sentinel West Point, Volume 10, Issue 9 (October 2017). At <https://ctc.usma.edu/posts/a-view-from-the-ct-foxhole-lisa-monaco-former-assistant-to-president-barack-obama-for-homeland-security-and-counterterrorism>.

²Alex P. Schmid, "Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues", ICCT Policy Brief (October 2015).

³"How Many Fighters Does the Islamic State Really Have?" University of Texas War on the Rocks (9 February 2015). At <https://warontherocks.com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-really-have/>.

⁴Rohan Gunaratna, "Global Threat Forecast", Counter Terrorist Trends and Analysis, Volume 10 Issue 1 (February 2018)



Kekalahan IS yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah pada tahun 2017 dapat merubah pola aktivitas dan bentuk ancaman IS kedepannya. Kekalahan tersebut telah menyebabkan kembalinya ribuan FTF ke negaranya masing-masing. Kembalinya FTF tersebut dapat memperkuat organisasi lokal dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Irak dan Suriah. Dengan adanya FTF tersebut, IS memiliki potensi untuk mencapai ambisinya membentuk negara satelit⁷ di luar Irak dan Suriah.

Kekalahan tersebut juga dapat membuat IS akan meningkatkan propaganda untuk merekrut "lone wolf" baru dan memerintah mereka untuk melakukan serangan. Pada tahun 2016 saja, para "lone wolf" melakukan 35 serangan di 16 negara yang mengakibatkan hilangnya 172 nyawa⁸. Serangan "lone wolf" sangat sulit untuk terdeteksi dan diantisipasi mengingat mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan IS. Selain itu, melemahnya IS di Irak dan

Suriah memberikan peluang Al Qaeda untuk muncul kembali ke permukaan dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan IS. Kemunculan Al Qaeda kembali di Timur Tengah juga dapat memperkuat jaringan pendukungnya di negara lain.

Kawasan Asia Tenggara merupakan *hot zone* bagi berkembangnya IS dan penguatan kembali Al Qaeda di kawasan. Upaya perebutan Kota Marawi di Filipina oleh kelompok pengikut IS pada tahun 2017 merupakan indikasi kuat bagaimana IS dan FTF dari Asia Tenggara berusaha menjadikan wilayah ini sebagai satelit IS. Di saat yang bersamaan, Asia Tenggara memiliki sejarah panjang akan kehadiran Al Qaeda. Kelompok teroris pendukung.

Al Qaeda memang saat ini nampak berupaya tidak naik kepermukaan namun ancaman mereka tidak boleh dianggap hilang sepenuhnya. Dalam kaitan ini, bagaimana strategi ASEAN dalam menghadapi perubahan lanskap terorisme global?

⁵ "Investigation, Prosecution, Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases For South and South-East Asia", UNODC (2018).

⁶ Marc Sageman, "Leaderless Jihad - Terror Networks in the Twenty-First Century" (University of Pennsylvania Press, 2008).

⁷ "Investigation, Prosecution, Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases For South and South-East Asia", UNODC (2018).

⁸ Overview: Terrorism in 2016", University of Maryland Study of Terrorism and Responses to Terrorism. https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_OverviewTerrorism2016_August2017.pdf.

Harmonisasi Agenda Global dan Regional

United Nations Global Counter-Terrorism Strategy yang disepakati sejak tahun 2006⁹ merupakan panduan bagi tiap negara dan organisasi regional dalam penanggulangan terorisme. Strategi ini memiliki empat pilar utama antara lain: memperbaiki kondisi yang dapat membantu penyebaran terorisme, mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan memerangi terorisme, mengambil langkah-langkah dalam membangun kapasitas negara-negara dalam mencegah dan memerangi terorisme dan memperkuat peran PBB serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum sebagai pondasi fundamental melawan terorisme.

Selain strategi global, PBB juga mendirikan *Office of Counter-Terrorism* yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua aktivitas penanggulangan terorisme oleh entitas-entitas di dalam sistem PBB, memperkuat pelaksanaan dukungan pembangunan kapasitas kepada negara anggota, dan memperbaiki visibilitas, advokasi dan mobilisasi sumber daya dalam upaya penanggulangan terorisme PBB¹⁰. Selain itu upaya global juga didukung oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait ancaman terorisme khususnya ancaman yang ditimbulkan karena munculnya FTF IS.

Pada review *Global Counter-Terrorism Strategy* tahun 2018¹¹ ditekankan pentingnya agar menjaga strategi untuk tetap relevan sehingga dapat menghadapi munculnya ancaman dan tren terbaru dari terorisme internasional. Review juga menekankan agar negara dan organisasi regional menerapkan *Global Counter-Terrorism Strategy* serta membangun rencana aksi pada level nasional, regional dan sub-regional untuk mencegah ekstremisme dan kondisi kondusif untuk terorisme serta meningkatkan kerjasama internasional, regional, sub-regional dan bilateral dalam menghadapi ancaman FTF.

Penanggulangan terorisme tentu saja juga menjadi salah satu area kerja sama utama di ASEAN. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) sudah disepakati oleh negara anggota ASEAN sejak 2007 dan telah berlaku sejak 2011. Peningkatan kerja sama di bidang kontra terorisme juga salah satu agenda utama dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025. Penguatan kerja sama di antara negara anggota dilakukan melalui forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC). Selain itu, ASEAN juga bekerjasama dengan negara-negara mitra wicara melalui ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF).

ASEAN selalu menyelaraskan agenda kerja samanya dengan agenda global yang disepakati dalam forum PBB maupun Resolusi Dewan Keamanan PBB. Baru-baru ini, ASEAN telah menyepakati ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism (2018 - 2025) dalam Pertemuan ke-12 AMMTC untuk menyikapi situasi ancaman terorisme terkini di Asia Tenggara¹². Dalam *Plan of Action* tersebut, terdapat empat area kerja sama prioritas, meliputi: pencegahan radikalisasi dan ekstremis berbasis kekerasan, kontra radikalisasi dan mempromosikan deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan legislasi nasional, serta kemitraan dan kerjasama regional. *Plan of Action* ASEAN ini juga merupakan bentuk dukungan nyata ASEAN dalam mengimplementasikan strategi global kontra terorisme yang disepakati di PBB.

Agenda Kedepan

Dalam mencegah IS menancapkan pengaruh semakin kuat di Asia Tenggara serta mencegah kembalinya Al Qaeda, maka implementasi ASEAN Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent

⁹<https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/un-global-counter-terrorism-strategy#poa2>

¹⁰<https://www.un.org/en/counterterrorism/index.shtml>

¹¹Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/72/284. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/284

¹²<https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf>

Extremism (2018 - 2025) sangatlah krusial. Hal ini dikarenakan Plan of Action (PoA) tersebut memiliki komponen-komponen penting dalam menangkal penyebaran paham radikal IS dan Al Qaeda di Asia Tenggara, seperti penguatan tata pemerintahan dan penghormatan HAM dan supremasi hukum, serta pemberdayaan generasi muda dan wanita. PoA tersebut juga memiliki komponen terkait pencegahan terjadinya kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, seperti pelibatan komunitas masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, pembangunan keterampilan dan pendidikan, serta pembukaan lapangan pekerjaan. ASEAN PoA juga akan memperkuat strategi komunikasi, terutama penggunaan internet dan sosial media untuk melawan narasi dan propaganda yang dilancarkan kelompok teroris. Selain itu, ASEAN harus terus berkoordinasi dengan Office of Counter-Terrorism PBB untuk terus melakukan harmonisasi pelaksanaan implementasi ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism (2018 - 2025) dengan Global Counter-Terrorism Strategy. Kebutuhan koordinasi yang erat diperlukan bagi kedua organisasi mengingat perubahan lanskap terorisme dapat terjadi kapan saja sehingga analisa situasi pada level global dan regional dapat saling mengisi untuk membentuk pendekatan komprehensif terhadap ancaman terorisme. Kemitraan antara kedua organisasi juga harus dapat meningkatkan kapasitas setiap anggota negara ASEAN dalam mengimplementasikan kedua kesepakatan tersebut.

Posisi Indonesia sebagai *the lead shepherd* dalam kerjasama pemberantasan terorisme di ASEAN dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB merupakan kesempatan strategis yang harus dimanfaatkan dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak hanya dapat terus memajukan isu terorisme Asia Tenggara dalam

agenda DK PBB, tapi juga dapat memobilisasi sumber daya PBB untuk penanggulangan IS dan Al Qaeda di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia dapat terus mendorong implementasi dari kerja sama komprehensif ASEAN-PBB untuk 2016-2020 serta mendorong identifikasi area kerja sama baru dalam penanggulangan terorisme.

Oleh:

M. Chandra Widya Yudha

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN
(Januari 2014 – Maret 2019)

PROJECTS 2045 DEMI SDGs

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Dalam rangka memperingati 60 tahun kerjasama diplomatik Indonesia-Jepang, Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Economic Research & Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menggelar seminar tingkat tinggi. Dalam acara yang digelar di Jakarta pada 8-9 Desember 2018 tersebut, para panelis dan peserta membahas "Project 2045" yang merupakan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Jepang sekaligus bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. "Project 2045" merupakan pemenuhan dari target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-17, yakni kemitraan untuk mencapai tujuan. Melalui kemitraan, Indonesia dan Jepang akan menjalin kerja sama menuju 2045 dalam menghadapi tantangan-tantangan kedepan.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ishii Masafumi dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Akimoto Tsukasa ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bilateral Jepang dan Indonesia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diadakan pada 15 November 2018 lalu.

Jepang meyakini pentingnya Indonesia dalam

mencapai target SDGs bagi kemajuan ASEAN. Kerjasama Indonesia-Jepang di bidang ekonomi diharapkan dapat mencapai target 1, 2, 8, 9 dan 10 dari SDGs, di mana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta inovasi di bidang industri dan pengadaan infrastruktur diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan mengurangi kesenjangan di masyarakat.

Tak hanya itu, untuk mencapai kualitas hidup yang tertuang dalam SDGs diperlukan pemerintahan/institusi yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan, penerapan konsep kota pintar (smart city), pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang memadai, juga memperhatikan kelestarian lingkungan yang sejalan dengan target-target SDGs yang terkait dengan lingkungannya.

Kemitraan Indonesia dan Jepang menasar pada SDGs guna mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan slogan "Our Common Future", Indonesia dan Jepang melangkah bersama menuju 2045.

Proyek ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas). Di dalam visi Indonesia 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan akan naik dari US\$3.377 pada 2015 menjadi US\$23.199 pada 2045.

Tidak hanya itu, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan juga diproyeksikan akan naik dari 0,008 persen pada 2015 menjadi 1,5-2 persen pada 2045.

Dalam visi tersebut, "Project 2045" mencanangkan 3 target yakni (1) menjunjung tinggi demokrasi dan menjadi kekuatan maritime dunia; (2) masuk kedalam lima besar perekonomian dunia; (3) mencapai kualitas hidup yang tinggi melampaui SDGs 2030.

Masuk 5 besar perekonomian dunia

Dalam skenario ideal, Indonesia diproyeksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 di dunia, dengan peringkat nomor 4 diduduki oleh Jepang. Untuk mencapai target tersebut, kedua Negara memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah mendorong masuknya

aliran modal asing, meningkatkan ekspor, serta melakukan pengadaan infastruktur yang akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa dan mengurangi tingkat pengangguran.

Mencapai kualitas hidup yang melampaui SDGs 2030

Mencapai kesenjangan sosial adalah salah satu target utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia dan Jepang akan bekerja sama memperkuat relasi antara investasi jepang dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan adalah menyediakan pendidikan vokasi yang terkait dengan industri dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

Oleh:

Haykal Yusa Pratomo

(Peserta Magang Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Januari 2019 dari Ilmu Ekonomi angkatan 2016, Universitas Indonesia, Depok);

Editor: Shirley Basauli Agustina



Perempuan dan Perdamaian yang Berkelanjutan



Dok. Kementerian Luar Negeri

Konflik dengan kekerasan dan konflik senjata seringkali memberikan dampak yang lebih besar kepada perempuan dan anak-anak, dibanding terhadap laki-laki dewasa. Kekerasan seksual, misalnya, sering menjadi instrumen perang di mana perempuan dan anak-anak menjadi target utama.

Setelah konflik usai pun, penderitaan mereka kerap belum usai. Para penyintas kekerasan seksual masih mengalami trauma, tanpa akses terhadap dukungan dan konsultasi psikologi. Mereka bahkan tak jarang kehilangan harapan akan keadilan atas kejahatan yang mereka alami pada masa konflik.

Meskipun seringkali mendapat dampak yang lebih besar akibat konflik, perempuan justru selalu terpinggirkan dalam proses resolusi konflik formal dan proses perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan pasca

perdamaian dan program rekonsiliasi sering mengabaikan kebutuhan khusus perempuan. Berdasarkan data dari UN Women, dalam rentang 1990 – 2017, hanya ada 2 persen mediator perempuan, 8 persen negosiator, dan 5 persen saksi dan penandatanganan dalam proses perdamaian di seluruh dunia. Sementara data dari Womankind Worldwide menunjukkan bahwa dari 585 perjanjian perdamaian yang ada dari 1990 hingga 2010, hanya ada 92 perjanjian yang memuat referensi tentang perempuan secara khusus.

Hal ini sangat ironis karena perempuan sebenarnya adalah aktor penggerak dalam menciptakan perdamaian di komunitas lokal mereka. Peran aktif perempuan sangat penting di tingkat akar rumput selama dan setelah konflik guna menciptakan perubahan setelah konflik dan perang usai.

Memahami Dampak Konflik Bersenjata terhadap Perempuan

Dalam setiap konflik bersenjata, apa yang dialami perempuan cenderung berbeda dari laki-laki. Semasa konflik bersenjata, perempuan menghadapi risiko dan bahaya yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat sipil lainnya, terutama laki-laki. Tidak sedikit laporan kasus bahwa selama konflik bersenjata berlangsung, banyak terjadi perkosaan sistematis dan kekerasan seksual lainnya. Tetapi tak hanya itu. Mereka juga menghadapi berbagai masalah lain yang terkait dengan kekerasan dan keamanan.

Hal tersebut bisa terjadi karena sebagian besar perempuan tidak terlibat langsung dalam peperangan dan tak memegang senjata. Di sisi lain, institusi hukum, sistem moral dan perlindungan komunitas lemah sehingga kaum perempuan menjadi kelompok rentan.

Meski demikian, tak semua perempuan di kawasan konflik bersenjata menjadi korban semata. Tak sedikit dari mereka yang juga terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan ada yang menjadi kombatan. Ada yang melakukannya secara sukarela, ada pula yang dipaksa oleh orang lain. Dalam "United Nations (2002), 'Women, Peace and Security: Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1325 (2000)'" disebutkan, dari 1990 hingga 2002, perempuan turut ambil bagian dalam kelompok bersenjata setidaknya di 54 negara. Sementara yang terlibat langsung dalam konflik tercatat di 36 negara dari 54 negara tersebut.

Keterlibatan perempuan dalam kelompok bersenjata beragam bentuknya. Ada yang melakukan infiltrasi ke kelompok lawan untuk mendapatkan informasi, ada menyelundupkan senjata, atau sekedar mendukung dan memberikan perlindungan kepada para gerilyawan atau kombatan. Di Sierra Leone, misalnya, perempuan terpaksa membantu kelompok pemberontak untuk menyelundupkan senjata. Caranya beragam, misalnya memasukkannya di dalam keranjang ikan atau

di balik pakaian mereka. Terkadang mereka "menitipkannya" ke anak-anak mereka agar lolos melewati pos pemeriksaan.

Di sisi lain lagi, ada pula perempuan yang aktif menjadi bagian dari pemerintah atau ambil bagian menjadi kelompok penjaga perdamaian. Singkatnya, pada masa konflik, perempuan bisa berada di berbagai posisi, mulai dari menjadi korban, menjadi kombatan - termasuk di angkatan bersenjata, aktivis perdamaian, hingga aktor dalam proses perdamaian.

Pengalaman di Indonesia, perempuan Aceh terlibat menjadi kombatan dengan bergabung di angkatan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama masa konflik. Saat itu ada Inong Balee, angkatan bersenjata GAM khusus perempuan. Pada saat bersamaan, perempuan Aceh juga yang paling parah terkena dampak konflik baik dalam bentuk kehilangan suami atau anak, menjadi korban kekerasan seksual, maupun menjadi korban penghilangan paksa.

Perempuan dalam proses perdamaian

Perempuan sebenarnya telah terbiasa menjadi mediator dan pembuat keputusan di rumah tangga. Namun sering kali, hal tersebut tidak sejalan dengan keterlibatan mereka dalam proses perdamaian di masyarakat atau arena yang lebih luas lagi, baik formal maupun informal. Padahal, untuk menciptakan perdamaian yang abadi dibutuhkan peran perempuan yang lebih aktif.

Partisipasi perempuan dalam setiap proses perdamaian dinyatakan dapat meningkatkan kemungkinan kesepakatan damai akan bertahan lebih dari 15 tahun sebesar 35 persen. Dalam sebuah studi yang berjudul "Women's Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace", para peneliti dari University of Amsterdam menyelidiki 82 perjanjian damai dalam 42 konflik bersenjata di antara 1989 dan 2011. Mereka menemukan bahwa perjanjian damai dengan para penandatangan perempuan berbanding lurus dengan durasi perdamaian yang bertahan lama.

Selain itu, penelitian berjudul *Women's Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace, International Interactions* tersebut juga menunjukkan bahwa perjanjian damai yang ditandatangani oleh delegasi perempuan, tingkat implementasinya lebih tinggi untuk ketentuan sebuah perjanjian.

Ketidakselarasan antara pelibatan perempuan dalam proses damai dengan kontribusi aktif mereka dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) adalah inti dari apa yang dikenal dengan agenda *Women, Peace, and Security (WPS)* yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1325 yang disetujui pada 31 Oktober 2000. Resolusi DK PBB 1325 menekankan pentingnya pengarusutamaan perspektif gender dalam penyusunan dan implementasi dari kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi perdamaian yang stabil.

Agenda WPS telah membantu mengangkat isu hak-hak dan peran perempuan dalam membangun perdamaian. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa dengan melindungi status hukum perempuan, penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan memastikan agar mereka bisa berpartisipasi secara bebas dalam ruang publik, ini akan membangun hubungan gender yang berkeadilan, terutama dalam upaya menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Selain itu, di ASEAN juga terdapat *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN (Pernyataan Bersama dalam Mempromosikan Perempuan, Perdamaian,*

dan Keamanan) yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-31 di Manila pada 13 November 2017. Pernyataan Bersama tersebut bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki, sebagai kontribusi untuk menciptakan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama.

Pernyataan Bersama dimaksud mendorong ASEAN untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam inisiatif dan strategi pencegahan konflik dan memastikan partisipasi penuh perempuan dalam berbagai proses perdamaian, termasuk pencegahan konflik, rekonstruksi paska-konflik dan proses rehabilitasi. Selain itu, dokumen tersebut juga menunjukkan komitmen ASEAN untuk meningkatkan kapasitas perempuan sebagai *peace-builder*, baik sebagai mediator, negosiator, dan *first responder* di tingkat lokal, nasional, juga regional.

Pada tataran global, perempuan sebenarnya telah lama terlibat aktif dalam proses damai, formal dan informal, baik secara individu maupun kelompok. Pada masa Perang Dunia Pertama, misalnya, tidak kurang dari 1.200 perempuan, baik dari negara-negara yang ikut perang maupun negara netral, maju bersama-sama memprotes konflik yang sudah berlangsung sekian lama. Mereka juga membentuk *Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)*, sebuah organisasi yang mengadvokasi isu hak asasi manusia (HAM) dan perlucutan senjata. Pada 1980-an, gerakan perempuan untuk perdamaian menyebar di Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Australia yang disusul dengan pendirian kamp perdamaian wanita di 11 negara.

Dalam berbagai kasus konflik di dunia, perempuan dimobilisasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan genting di komunitas mereka. Misalnya saja, perempuan di Suriah, yang terlibat dalam negosiasi bantuan kemanusiaan di tingkat lokal. Bahkan ada perempuan yang menjadi petinggi dalam tim negosiasi dengan oposisi Suriah.



Contoh lain adalah perempuan di Republik Afrika Tengah yang kerap bertindak sebagai negosiator bagi kelompok bersenjata yang berkonflik. Juga seorang perempuan, Catherine Samba-Panza, mantan kepala negara Republik Afrika Tengah, terlibat sebagai co-chair pada tingkat senior dari sebuah jaringan mediator perempuan Afrika.

Di Kawasan Asia Tenggara sendiri, perempuan Rohingya turut terlibat dengan mendokumentasikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Tatmadaw (militer Myanmar). Mereka juga terlibat dalam negosiasi untuk gencatan senjata di Kahin State.

Peran Kementerian Luar Negeri

Peran perempuan dalam dinamika negosiasi perdamaian maupun penyelesaian konflik dapat dilihat nyata. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Retno Marsudi terus mengangkat isu pelibatan perempuan di dalam proses perdamaian dunia. Hal ini muncul dari kesadaran karena tidak sedikit perempuan dan anak menjadi korban akibat dari konflik, serta fakta bahwa perang selalu membawa dampak lebih pada perempuan dan anak.

Pada Arria-Formula Meeting, sebuah pertemuan di Markas PBB pada 24 Januari tahun ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan beberapa hal kunci dalam upaya meningkatkan peran perempuan sebagai agen dalam proses pembangunan perdamaian.

Pertama, perlu didorong adanya Rencana Aksi Nasional yang memuat elemen penguatan hak politik, sosial dan ekonomi perempuan, serta elemen infrastruktur hukum untuk mendukung Rencana Aksi tersebut. Kedua, memperkuat kemitraan, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas masing-masing negara dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional tersebut. Terakhir, harus ada kesadaran bahwa setiap upaya meningkatkan kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian sama dengan berinvestasi terhadap perdamaian itu sendiri.

Hal tersebut juga direalisasikan pada kebijakan nasional Indonesia. Sebagai contoh, pengiriman personel perempuan pada Kontingen Garuda dari Indonesia di misi perdamaian PBB. Kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan kedekatan Kontingen Garuda Perempuan dengan perempuan dan anak-anak korban konflik sehingga menciptakan atmosfer pendekatan yang lebih aman dan mereka tidak merasa terintimidasi.

Selain itu, pada 8-10 April lalu juga telah diselenggarakan kegiatan *Regional Training on Women, Peace and Security* di Jakarta. Kegiatan pelatihan tersebut ditujukan bagi diplomat perempuan tingkat junior dan menengah dari negara-negara ASEAN, Papua Nugini, dan Timor Leste sebagai platform untuk membekali mereka dengan kemampuan untuk menjadi agen perdamaian.

Pelatihan tersebut bisa dikatakan sebagai inisiatif pertama di kawasan yang ditujukan khusus bagi diplomat perempuan. Dengan pelatihan yang telah menghadirkan pakar dan praktisi perdamaian tersebut, diharapkan para perempuan diplomat lebih mampu terlibat dalam berbagai fase pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia pun telah berkontribusi dalam mempersiapkan diplomat-diplomat perempuan ASEAN yang siap terjun langsung dalam proses penciptaan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Oleh :
Adhyanti Sardanarini Wirajuda
 Kepala Sub Direktorat Politik,
 Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN

KIPRAH PERTAMA KOORDINASI INDONESIA

PERTEMUAN TINGKAT PEJABAT TINGGI ASEAN-RUSIA ke-16

Hubungan ASEAN dan Rusia telah dimulai sejak Juli 1991 ketika Deputy Perdana Menteri Rusia, Yuri Maslyukov, diundang Pemerintah Malaysia untuk menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur. Lima tahun kemudian, pada Juli 1996, Rusia menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN dalam AMM ke-29 di Jakarta. Kemudian dalam KTT ASEAN-Rusia ketiga di Singapura pada November 2018, Rusia menjadi Mitra Strategis ASEAN dengan komitmen dari kedua pihak untuk meningkatkan kolaborasi.

Saat ini, Indonesia merupakan negara koordinator Kerja Sama ASEAN-Rusia (2018-2021). Dalam periode ini, Indonesia dan Rusia sepakat menitikberatkan Kerja Sama ASEAN-Rusia pada tiga bidang yaitu penanggulangan terorisme, keamanan siber, dan penanganan bencana. Sedangkan pedoman umum Kerja Sama ASEAN-Rusia tertuang dalam dokumen Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation between the Association of

Southeast Asian Nations and the Russian Federation 2016-2020 (ASEAN-Russia PoA).

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN-Rusia ke-16

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN-Rusia (ARSOM) ke-16 pada 19-20 Februari 2019 di Bali. Ini pertemuan pertama di bawah koordinasi Indonesia. Pertemuan ini dipimpin bersama oleh Ketua SOM ASEAN-Indonesia, Jose Tavares, dan Deputy Menteri Luar Negeri Rusia selaku Ketua SOM Rusia, Igor Morgulov. Pertemuan ini juga diikuti oleh para Ketua SOM atau yang mewakili dari negara-negara anggota ASEAN serta Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Politik dan Keamanan, Hoang Anh Tuan.

Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis untuk memperkuat kemitraan ASEAN-Rusia, antara lain tentang perkembangan di



Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN-Rusia ke-16

Untuk menghadiri pertemuan di Bali tersebut, delegasi Rusia menumpang Aeroflot dalam penerbangan langsung dari Moskow ke Bali yang ditempuh dalam waktu hampir 13 jam. Sebagai informasi, Garuda Indonesia saat ini juga tengah menjajaki penerbangan langsung ke Rusia. Konektivitas ini merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempromosikan pariwisatanya dan mendorong peningkatan pengunjung baik dari Rusia maupun negara-negara di sekitarnya.



ASEAN maupun Rusia dan tindak lanjut hasil KTT ASEAN-Rusia ketiga di Singapura pada 14 November 2018. Bidang-bidang kerja sama yang juga dibahas adalah penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas negara; kerja sama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, energi dan agrikultur; penanganan bencana; dan pendidikan. Pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran pandangan terkait dengan isu-isu di kawasan, termasuk pembahasan arsitektur kawasan Asia-Pasifik, non-proliferasi nuklir, dan situasi di Semenanjung Korea.

Dalam hal perkembangan Kerja Sama ASEAN-Rusia, Indonesia menyampaikan capaian-

capaian antara lain telah disusunnya sejumlah *statements* oleh ASEAN bersama Rusia baik dalam kerangka ASEAN+1 maupun East Asia Summit (EAS) terutama dalam bidang penanggulangan terorisme dan keamanan siber. Dalam bidang kerja sama lainnya, capaian yang dapat dicatat antara lain pelaksanaan ASEAN-Russia University Forum pada 2016 dan 2017; ASEAN-Russia Youth Summit pada 2016; peluncuran Network of ASEAN-Russia Think-Tank pada 2018; serta implementasi beberapa proyek bersama di bidang pariwisata, energi, konektivitas transportasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi



Dok. Kementerian Luar Negeri

Thailand untuk menyampaikan kembali tema keketuaannya, *Advancing Partnership for Sustainability*, dan memastikan dukungan positif dari Rusia sebagai salah satu mitra strategis. Adapun Sekretariat ASEAN menyampaikan komitmen ASEAN untuk berkontribusi pada upaya penyelesaian isu-isu di kawasan dan upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap ASEAN. Sekretariat ASEAN juga menyampaikan harapan seluruh mitra wicara termasuk Rusia untuk mendukung peran penting ASEAN pada arsitektur regional dan implementasi the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025. Sebagai tanggapan, Rusia menyatakan kembali komitmennya untuk terus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung integrasi dan sentralitas ASEAN.

Rusia juga menggunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali pentingnya partisipasi negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan ASEAN - Russia Dialogue Partnership Financial Fund (ARDPFF). Saat ini terdapat dana ARDPFF sejumlah US\$ 8,2 juta yang mungkin akan dihentikan oleh Kementerian Keuangan Rusia jika negara-negara ASEAN

dianggap tidak memanfaatkannya secara optimal. Dana ARDPFF sebagaimana juga dana dari Mitra Wicara ASEAN lainnya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dari negara-negara anggota ASEAN dengan mengajukan proposal kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

KERJA Sama ASEAN-Rusia di Masa Mendatang

Salah satu hasil pembahasan Pertemuan ARSOM ke-16 yang membutuhkan tindak lanjut adalah terkait dengan akselerasi implementasi ASEAN-Russia PoA yang akan segera berakhir pada 2020. Hal ini sejalan dengan kemitraan strategis yang diberikan kepada Rusia dalam KTT ketiga ASEAN-Rusia di Singapura akhir tahun lalu yang juga menjadi salah satu upaya menciptakan momentum untuk meningkatkan upaya implementasi PoA tersebut. Berikutnya, Indonesia sebagai negara koordinator perlu memulai identifikasi bidang kerja sama potensial dan konkret sebagai bahan penyusunan ASEAN-Russia PoA berikutnya (2021-2025).

Pekerjaan rumah berikutnya bagi Kerja Sama ASEAN-Rusia adalah tindak lanjut dari



Deputi Menteri Luar Negeri Rusia selaku ketua SOM Rusia, Igor Margulov bersama dengan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares

Selain ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (ARDPFF), banyak Mitra Wicara ASEAN yang juga menyediakan jutaan dolar melalui mekanisme ASEAN Trust Fund and Project Fund. Semua dana dalam mekanisme tersebut dapat diakses oleh publik di negara-negara anggota ASEAN dan Mitra Wicara terkait dengan mengajukan proposal kepada Sekretariat ASEAN sesuai dengan format dan ketentuan yang ada.

the Statement of ASEAN and the Russian Federation on Cooperation in the Field of Security of and in the Use of Information and Communication Technology. Dalam bidang ini, Rusia mengharapkan ASEAN-Russia Dialogue on ICT security-related issues dapat segera dilaksanakan pada tahun ini di sela penyelenggaraan ARF Intersessional Meeting on ICTs Security di Singapura atau di sela pertemuan ASEAN Telecommunications and IT Ministers' Meeting.

ASEAN dan Rusia juga sepakat untuk segera menyelesaikan draf MoU terkait dengan kerja sama penanggulangan bencana. Dalam bidang

ini, Rusia diharapkan dapat terus melanjutkan dukungannya terhadap AHA Center baik dalam bentuk bantuan teknis maupun finansial sebagai tindak lanjut dari Pertemuan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) ke-33 pada Oktober 2018 yang menyetujui peningkatan kontribusi pada AHA Centre periode 2019-2023.

Oleh :
Shofi Nurul Himmah
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN
Maret 2019

KEMITRAAN ASEAN – SELANDIA BARU UNTUK PENCAPAIAN SASARAN SDGs

Disepakatinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada 2015 lalu merupakan momentum bagi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengintegrasikan pembangunan Negara-negara anggotanya. Tercapainya SDGs berarti mencerminkan terwujudnya stabilitas ekonomi kawasan, pertumbuhan pendapatan yang kuat, transformasi struktural dan peningkatan infrastruktur yang kemudian dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Untuk mencapai SDGs, tentu saja diperlukan beragam upaya di berbagai bidang, termasuk kerja sama dan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satu bentuk kemitraan yang dibangun ASEAN misalnya kemitraan ASEAN-Selandia Baru.

Hubungan antara ASEAN dengan Selandia Baru telah terjalin sejak 1970-an. Salah satu bentuk kerjasama yang telah dibangun adalah pembentukan pakta perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, dan New Zealand yang bernama ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Kerja sama tersebut memiliki nilai strategis yang diharapkan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Terlebih, saat ini terdapat peningkatan kemitraan ASEAN-Selandia Baru menjadi kemitraan strategis yang telah dimulai pada 2015 silam.

Penguatan komitmen Selandia Baru sebagai mitra strategis ASEAN tercermin dalam partisipasi aktif di berbagai kerjasama dan program-program pengembangan. Sebagai salah satu mitra wicara ASEAN, Selandia Baru cukup terbilang aktif menyelenggarakan program-program yang terkait dengan peningkatan pembangunan kapasitas bagi ASEAN untuk efektivitas Area Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-Australia-New Zealand dan mendorong terwujudnya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Salah satunya adalah kesepakatan Rencana Aksi 2016-2020 yang diputuskan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 2015. Dalam Rencana Aksi tersebut dilakukan dua pendekatan, yakni Strategi Masyarakat (*People Strategy*) dan Strategi Kemakmuran (*Prosperity Strategy*). Strategi Masyarakat akan fokus kepada program-program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Misalnya, program terkait beasiswa, pertukaran pelajar, program kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, pengembangan masyarakat, serta pelatihan teknis dan keterampilan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar warga dan komunitas di ASEAN dan Selandia Baru.

Sedangkan Strategi Kemakmuran akan fokus pada kerja sama yang menjadi sektor unggulan Selandia Baru, yakni yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, pertanian, hingga peternakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi kedua pihak. Hal



Dok. Experiencethetrilogy.com

ini sekaligus untuk membantu mempersempit kesenjangan pembangunan diantara negara-negara anggota ASEAN.

Beberapa program Rencana Aksi yang telah tercapai pada periode 2016-2017 antara lain latihan militer gabungan "Exercise on Mahi Tangaroo" dalam kerangka ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) – Plus Experts Working Group on Maritime Security (2014-2017) dan pembentukan Program Kerja Sama Perdagangan dan Pengaturan ASEAN-Selandia Baru dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnis untuk mengoptimalkan AANZFTA.

Program Kerja Sama Perdagangan dan Pengaturan mengelola dana sebesar NZD 500.000, yang dikhususkan untuk program peningkatan kapasitas ASEAN dalam rangka mendorong integrasi ekonomi ASEAN-Selandia Baru.

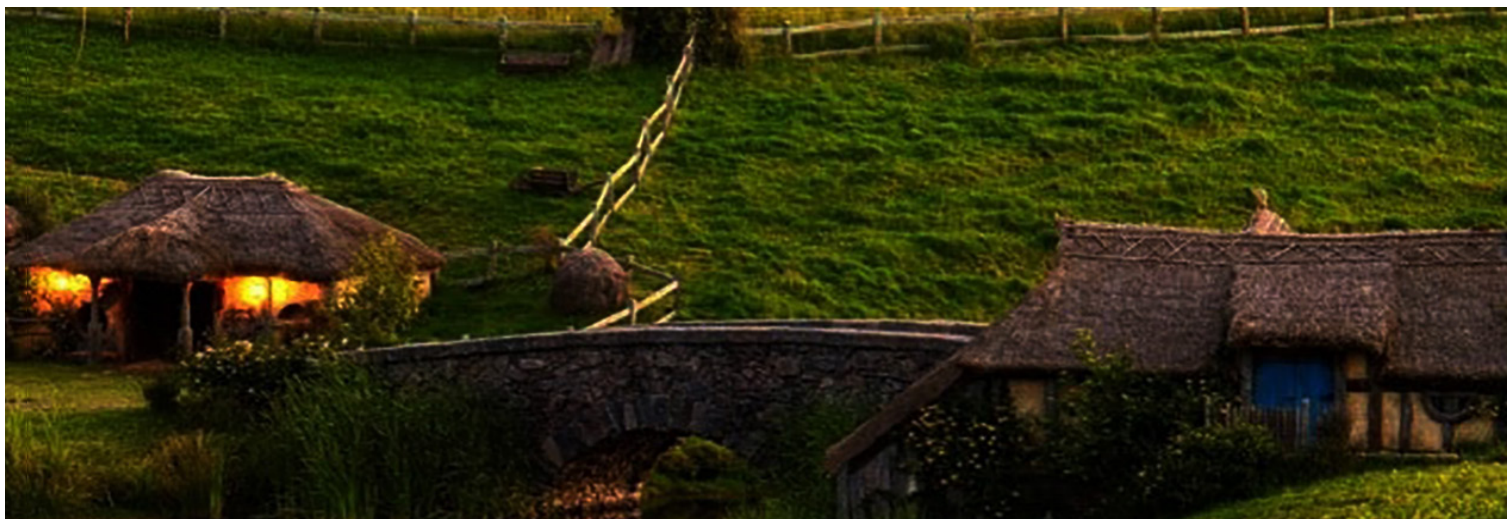
Selain itu, terdapat Tur Studi Diplomat Muda ASEAN ke Selandia Baru, Inisiatif Pemimpin Muda Bisnis ASEAN-Selandia Baru, juga pemberian beasiswa S2 untuk pelajar ASEAN di Selandia Baru; dan program Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pejabat.

Dalam konteks kerja sama ASEAN-Selandia Baru, Rencana Aksi berkontribusi nyata untuk terwujudnya target SDGs, terutama poin ke-4 dan 11, yakni pendidikan berkualitas serta kota dan komunitas yang berkelanjutan. Selain itu, menengok periode 2013-2017, Rencana Aksi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di ASEAN sebesar 5-6 persen setiap tahunnya.

Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, juga turut merasakan manfaat dari Rencana Aksi tersebut, di antaranya pemberian beasiswa kepada 60 mahasiswa untuk program pasca sarjana dan 36 pelatihan jangka pendek di bidang pertanian, energi terbarukan, manajemen risiko bencana, kepemimpinan sektor publik dan pengembangan sektor swasta. Ditambah lagi digelarnya pelatihan bahasa inggris untuk 20 pejabat Indonesia di Selandia Baru dan 25 peserta di Indonesia setiap tahunnya.

ASEAN dan Selandia Baru pun masih terus berkomitmen dalam meningkatkan proyek proyek terkait Strategi Masyarakat dan Strategi Kemakmuran. Di masa depan, negara-negara anggota ASEAN mengharapkan Selandia Baru dapat memberikan dukungan lebih kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu prioritas dalam membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Oleh:
*Marini Setiani (Peserta Magang Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN),
 Januari-Februari 2019 dari Hubungan Internasional angkatan 2016,
 Universitas UPN Veteran, Jawa Timur
 Editor: Shirley Basauli Agustina*



INSPIRASI DARI YAMAGUCHI : " CERITA DI BALIK MAJU NYA JEPANG "





Rurikoji candi agama Budha di Kota Yamaguchi
Dok. www.japan-guide.com

Siapa yang tidak kenal Doraemon, Pokemon, Digimon atau berbagai karakter anime/manga lainnya? Siapa yang tidak ingin pergi ke Tokyo, Kyoto, atau Osaka untuk melihat kuil-kuil indah, bunga sakura bermekaran, atau sekedar berbelanja? Atau, siapa yang tidak tahu berbagai produk Jepang seperti Honda, Yamaha, Toyota, Mitsubishi, Sharp, Panasonic, dan masih banyak lagi. Ya, tanpa disadari, Jepang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari peralatan elektronik dan kendaraan, serial kartun dan berbagai hiburan, hingga menjadi destinasi liburan impian. Tapi pernahkah masyarakat Indonesia bertanya, apa yang menjadikan Jepang maju seperti sekarang?

Melalui Program JENESYS 2018: 20th Batch, Exchange of Young Diplomats, 10 Diplomat Muda Indonesia, termasuk saya, mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang Jepang. Dari total program yang berlangsung selama 7 hari (29 Januari – 4 Februari 2019) di Jepang, para peserta diajak untuk mengunjungi Prefektur Yamaguchi selama 4 hari. Kami pun penasaran. Mengapa Yamaguchi? Mengapa bukan Osaka yang dikenal sebagai kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo? Mengapa bukan juga Kyoto yang kental dengan sejarah Jepang? Apa yang istimewa dari Yamaguchi?

Setelah mendapatkan *briefing* dari Japan International Cooperation Centre (JICE) selaku penyelenggara program dan berkunjung ke Tokyo Metropolitan Government Building di hari pertama serta *courtesy* ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo dan mengunjungi National Diet Building (Gedung Parlemen Jepang) di hari kedua, kami bertolak ke Yamaguchi di hari ketiga. Setelah tiba di Yamaguchi, kami langsung berdialog dengan Perwakilan Pemerintah Prefektur Yamaguchi. Prefektur yang terletak di ujung barat Pulau Honshu ini terdiri dari 13 kota, Yamaguchi-Shi sebagai ibukotanya. Dengan total penduduk hanya sekitar 1,5 juta jiwa, Yamaguchi termasuk prefektur kecil bila dibandingkan dengan Tokyo yang dihuni oleh sekitar 9 juta jiwa atau Osaka yang ditinggali oleh sekitar 8,8 juta jiwa. Secara umum, Yamaguchi dikenal sebagai penghasil produk pertanian dan perikanan, memanfaatkan kondisi daratan yang subur dan dikelilingi oleh laut di sisi utara, barat, dan selatan.

Yamaguchi juga merupakan daerah asal Perdana Menteri Shinzo Abe yang saat ini menjabat sejak tahun 2012. Abe terpilih menjadi anggota



Dok. www.japan-guide.com



Ilustrasi: Yoshida Shoindan

parlemen mewakili Distrik I Prefektur Yamaguchi pada tahun 1993.

Tidak heran bila Abe memberikan perhatian lebih kepada Yamaguchi, terlebih saat dia menjabat sebagai PM Jepang. Namun, selain fakta-fakta tersebut, Yamaguchi ternyata menyimpan kisah dan sejarah Jepang yang menarik.

Kisah Yoshida Shoindan Chosu Five

Cikal bakal kemajuan Jepang ternyata dimulai di

Yamaguchi, tepatnya di kota Hagi, kota yang kami kunjungi pada hari kedua di Yamaguchi. Situs pertama yang kami tuju adalah Museum Hagi. Di sana kami mendapat informasi lengkap terkait sejarah Kota Hagi dan peninggalan historisnya.

Kota Hagi ditetapkan sebagai castle town pada era Tokugawa Shogunate.

Sebagai sebuah castletown, Hagi banyak bersinggungan dengan kapal-kapal asing dari Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan AS yang membawa berbagai barang hasil industri dan senjata untuk diperdagangkan.

Hal tersebut membuat masyarakat Hagi berkeinginan untuk mampu memproduksi sendiri barang-barang logam yang diperdagangkan oleh Barat dan bahkan kapal perang. Meskipun percobaan yang dilakukan selalu gagal, namun upaya gigih tersebut terabadikan dalam sejarah Jepang melalui situs Hagi Reverberatory Furnace yang dibangun pada tahun 1856. Situs tersebut menandakan cikal-bakal revolusi industri Jepang yang kemudian berkembang pesat di awal era Restorasi Meiji.

Adalah Yoshida Shoin, seorang tokoh Hagi yang dinobatkan sebagai pengobar semangat industrialisasi. Shoin dikenang masyarakat Jepang karena kegigihannya dalam belajar dan mengajarkan pentingnya *will power* dan *self-help efforts* kepada masyarakat di jamannya guna memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Shoin terlahir dari keluarga kelas Samurai menengah, di tengah masyarakat Jepang yang masih terbagi dalam kasta. Di usia 21 tahun, Shoin berjalan berkeliling daratan Jepang selama 3,5 tahun untuk mempelajari dan mengenal kondisi masyarakat Jepang, mengajar, hingga mampu membuat peta Jepang pertama. Pada tahun 1854 hingga 1859, Shoin dipenjara karena dianggap berbahaya oleh keshogunan

Tokugawa. Shoin pernah mencoba naik ke kapal AS yang tengah bersandar, meminta untuk dibawa ke AS agar mempelajari dunia luar. Shoin berpandangan bahwa saat itu Jepang terlalu menutup diri sehingga perlu belajar banyak hal dari luar demi kemajuan Jepang.

Singkat cerita, upaya untuk pergi ke AS gagal. Shoin akhirnya diserahkan kepada Tokugawa untuk dipenjara di Edo -kini Tokyo, sebelum dipindahkan ke Hagi sebagai tahanan rumah. Selama menjadi tahanan, Shoin tetap mengajarkan apa yang ia percaya kepada para tahanan lain. Bahkan selama menjalani masa tahanan rumah di Hagi, Shoin menjadikan sebuah ruangan berukuran 3x3 meter di rumah pamannya sebagai sekolah dan mengajar masyarakat sekitar tentang *will power, self-help efforts*, dan pentingnya untuk senantiasa belajar. Kami pun berkesempatan untuk mengunjungi bekas ruangan yang dijadikan sekolah oleh Yoshida Shoin.

Dari ruangan kecil itu, ide-ide Shoin terus berkembang dan semakin banyak pula yang ingin menjadi muridnya. Pada 1859, Shoin diminta diserahkan kembali ke penjara Edo oleh Tokugawa karena dianggap semakin berbahaya, ditambah dengan kondisi yang tidak kondusif akibat maraknya aksi pemberontakan di

berbagai daerah di Jepang untuk melawan Tokugawa.

Ide-ide revolusioner Shoin memang menjadi ancaman bagi Tokugawa, dan Shoin pun mengakui telah merencanakan aksi pemberontakan. Akhirnya, Shoin dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Edo pada tahun yang sama.

Namun, ide-ide Shoin telah menyebar meskipun Shoin telah tiada. Gerakan revolusi dilakukan di berbagai daerah untuk melawan Tokugawa dan menuntut perubahan sepanjang tahun 1860an. Di tengah upaya revolusi, terdapat 5 pemuda yang akhirnya berhasil menyelundupkan diri keluar dari Jepang untuk belajar di University College London (UCL) di Inggris pada tahun 1863. Mereka dikenal sebagai Choshu Five karena berasal dari Choshu, sebutan lain dari Hagi. Mereka diketahui pernah menjadi murid dari Yoshida Shoin dan terinspirasi untuk belajar dari Barat yang saat itu menjadi kiblat dari ilmu pengetahuan dan industri. Mereka adalah Ito Hirobumi, Inoue Kaoru, Inoue Masaru, Endo Kinsuke, dan Yamao Yozo.

Ketika mereka kembali ke Jepang setelah menempuh pendidikannya masing-masing selama sekitar 1-4 tahun, konflik berangsur usai. Tokugawa akhirnya berhasil ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar di Kyoto, dan Restorasi Meiji dimulai. Choshu Five kemudian menjadi pelopor dimulainya industrialisasi serta pembaharuan sistem politik dan sosial di Jepang pada masa awal Restorasi Meiji. Ito Hirobumi menjadi PM Jepang pertama pada tahun 1885. Inoue Kaoru menjadi Menlu Jepang pertama. Inoue Masaru

merancang konstruksi kereta api di Jepang sehingga dikenal sebagai Bapak Kereta Api. Endo Kinsuke mengembangkan sistem keuangan Jepang lalu menjadi Kepala Japan Mint Bureau. Yamao Yozo memelopori industri Jepang dan memodernisasi pendidikan *engineering*.

Yoshida Shoin dan Choshu Five telah menjadi bagian dari sejarah Jepang. Keduanya telah meletakkan pondasi revolusi industri di Jepang sehingga Jepang menjadi negara maju seperti sekarang. Yoshida Shoin telah menginspirasi masyarakat Jepang untuk terus belajar dan berwawasan luas, sementara Choshu Five yang terinspirasi dari Yoshida Shoin menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk belajar secara sungguh-sungguh dan membawa pulang ilmu yang diperoleh untuk diterapkan demi kemajuan Jepang. Seiring berjalannya waktu, Jepang berkembang menjadi salah satu negara terdepan dalam bidang industri dan teknologi.

Mewarisi semangat Yoshida Shoin dan Choshu Five

Kisah Yoshida Shoin dan Choshu Five tidak hanya menarik dan menginspirasi masyarakat Jepang saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang



Peserta Program Jenesys di Jepang

Profesor di Yamaguchi University, kisah Yoshida Shoin dan Choshu Five seharusnya dapat menginspirasi semua orang dari negara manapun. Hal itulah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Yamaguchi yang kami temui di hari berikutnya. Kami berbagi cerita mengenai apa yang telah kami pelajari mengenai Jepang, khususnya selama kami tinggal di Yamaguchi.

Ada sekitar 300 WNI yang tinggal dan tersebar di seluruh Prefektur Yamaguchi. Secara umum mereka adalah pekerja, peserta magang/kursus, dan pelajar. Setidaknya ada sekitar 27 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program Master dan PhD di Yamaguchi University. Teknologi dan sains adalah bidang yang banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia di Yamaguchi untuk bekerja dan sekolah. Selain terkenal dengan produk pertanian dan perikanan, Yamaguchi juga terkenal dengan produk-produk manufakturnya. Dengan kondisi masyarakat Yamaguchi yang kekurangan tenaga kerja, sebagaimana permasalahan Jepang pada umumnya, kebutuhan tenaga kerja asing menjadi tinggi. Peluang itulah yang coba dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia di sana.

Adanya kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Yamaguchi untuk merangkul para pendatang sangat membantu masyarakat Indonesia yang tinggal di Yamaguchi. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah belajar bahasa Jepang, pertemuan rutin, dan pelatihan tanggap bencana. Hal tersebut secara tidak langsung mematahkan stigma terhadap masyarakat Jepang yang dipandang kurang ramah dan cenderung tertutup terhadap orang asing.

Melalui program tersebut, masyarakat Jepang juga seakan menunjukkan bahwa mereka sedang berbalas budi kepada warga asing. Sebagai bangsa yang menjadi maju karena menyerap pengetahuan dari luar, Jepang juga ingin menjadi rujukan dan tempat yang nyaman untuk belajar bagi warga asing lainnya.

Menilik kembali semua hal yang kami temui dan pelajari di Yamaguchi, kami akhirnya memahami arti penting Yamaguchi bagi Jepang dan pesan yang ingin dibagikan kepada kami. Lebih jauh, kami memiliki harapan agar kami dan seluruh masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri, baik untuk bekerja maupun belajar, dapat mewarisi semangat Yoshida Shoin dan Choshu Five.

Layaknya Yoshida Shoin, kami percaya bahwa tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus belajar, karena belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Layaknya Choshu Five, kami juga sepakat bahwa segala ilmu yang kami peroleh dari luar negeri sudah sepatutnya didedikasikan untuk kemajuan bersama masyarakat dan negara Indonesia.

*Liputan Program JENESYS 2018:
20th Batch, Exchange of Young Diplomats
Oleh: Arif Setyanto,
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN*



Rurikoji candi agama Budha di Kota Yamaguchi
Dok. www.japan-guide.com



Duta Muda ASEAN-INDONESIA 2017

DUTA MUDA ASEAN 2017:
PEMUDA BERPERAN PENTING DI
ASEAN

Pemilihan Duta Muda ASEAN – Indonesia 2019 semakin dekat. Kementerian Luar Negeri dibawah Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN akan memilih pemuda-pemudi Indonesia yang berwawasan Nusantara, memiliki pemahaman yang baik mengenai ASEAN, serta lancar dalam berbahasa asing untuk menjadi perpanjangan tangan dalam diseminasi informasi mengenai ASEAN bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita belajar dari dua Duta Muda ASEAN terdahulu, Westra dan Asyana.

Dua anak muda telah mengemban tugas menjadi Duta Muda ASEAN Indonesia sejak Agustus 2017. Amanah yang mereka emban, meningkatkan peran pemuda di ASEAN. Mereka adalah Westra Tanribali dan Asyana Scholastica Eka Putri Prasetyo.

Westra Tanribali, 26, saat ini bekerja sebagai consulting manager di sebuah firma asal Amerika Serikat. Saat masih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung, ia aktif di berbagai kegiatan mahasiswa seperti Model of United Nations dan Debat Bahasa Inggris.

Sementara Asyana Scholastica Eka Putri Prasetyo (23) saat ini bekerja di salah satu perusahaan *start up* teknologi sebagai *Business Analyst*. Alumnus SMA 8 Yogyakarta ini tak pernah diam sejak muda. Bahkan saat berusia 15 tahun, ia telah memulai usaha sendiri di bidang fashion batik. Asyana juga pernah mengikuti Mediterranean Model of United Nations di Perancis.

Westra dan Asyana berbagi gagasan dengan Masyarakat ASEAN mengenai perlunya kiprah anak muda di ASEAN.

Apa peran penting Pemuda Indonesia di ASEAN?

Westra: Pemuda telah dan akan terus memegang peran penting bagi ASEAN. Setidaknya ada dua peran penting pemuda di ASEAN. Pertama, sebagai agen untuk diseminasi informasi mengenai ASEAN kepada masyarakat luas. Pemuda dapat menjadi jembatan informasi lintas generasi di lingkungan mereka. Bukan hanya terbatas pada pengetahuan terkait ASEAN sebagai organisasi dan komunitas, tetapi juga isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berkaitan erat dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui media yang sedang berkembang saat ini di kalangan kawula muda, yakni media sosial, maupun melalui interaksi langsung seperti diskusi dan sosialisasi.



Dok. Kementerian Luar Negeri

Kedua, pemuda juga merupakan kontributor bagi kemajuan ASEAN. Pemuda di ASEAN terus memegang peranan sangat penting dalam pembangunan kawasan. Dalam hal ekonomi, misalnya, banyak anak muda yang telah menciptakan berbagai teknologi dan perusahaan start-up yang berskala nasional maupun regional yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayahnya.

Dari segi budaya, pemuda dapat berkontribusi dengan mempelajari, melestarikan, dan pada akhirnya mempromosikan budaya di negara-negara ASEAN kepada masyarakat umum, baik di dalam maupun luar kawasan ASEAN. Untuk isu politik dan pertahanan, pemuda juga dapat berkontribusi melalui penelitian ilmiah yang telah banyak dilakukan, baik di kampus maupun institusi peneliti yang berkaitan dengan topik pemecahan masalah di kawasan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Asyana: ASEAN mempunyai potensi yg sangat besar dalam hal sumber daya. ASEAN memiliki kekayaan alam, kekayaan budaya dan demografi. Selain itu ASEAN juga mulai didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Tapi semua potensi tersebut tidak akan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat ASEAN tanpa didorong SDM yang unggul. Di sini peran anak muda, terutama generasi milenial, jadi vital. Generasi milenial akrab dengan iptek dan adaptif dengan perkembangan jaman. Dengan bekal tersebut, anak muda bisa melampaui ide-ide generasi di atas mereka, lebih fleksibel dalam bekerja dan mengambil keputusan, lebih kreatif dan berani. Semua karakter khas anak muda ini diperlukan ASEAN agar bisa terus relevan dengan perkembangan jaman. Terlebih lagi, para pemuda ASEAN mempunyai latar belakang sejarah, politik, dan kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini bisa melahirkan ide-ide dan saling melengkapi di kalangan anak muda ASEAN.



Dok. Kementerian Luar Negeri

Yang terkini, dalam tiga pilar ASEAN, kita juga sudah bisa melihat bagaimana pemuda mulai *drive*, *take action*, dan *involve actively*, seperti misalnya menjadi *start up founders* dan membuka lapangan kerja, atau jadi politikus dan diplomat muda pembawa perubahan. Intinya, kehadiran anak muda di kancah ASEAN dipastikan bisa membawa angin segar bagi komunitas regional. Anak muda dapat diberi lebih banyak lagi kesempatan dan ruang untuk unjuk gigi sesuai dengan bidang yang mereka tekuni.

Dengan potensi pemuda yang kian besar, bagaimana kalian melihat pemuda di ASEAN?

Westra: Menyadari bahwa pemuda memiliki potensi yang sangat besar, ada beberapa hal yang menjadi keprihatinan saya. Pertama, masih banyak pemuda yang belum dapat memilih dan memilah informasi atau berita yang mereka dapatkan di berbagai media untuk dibaca dan dibagikan kepada orang lain. Hal ini sangat berbahaya karena pemuda malah dapat menjadi "alat" untuk menyebarkan berita yang negatif, provokatif, bahkan bersifat hoax.

Kedua, banyak dari kita yang belum menggunakan media sosial dengan tepat. Umumnya, anak muda masih menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Padahal akan jauh lebih baik jika pemuda dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bertukar informasi positif, ruang untuk berdiskusi, dan hal-hal bermanfaat lainnya dibandingkan sebatas untuk hiburan semata.



Dok. Kementerian Luar Negeri

Ketiga, rasa skeptis dan individualitas yang tinggi. Banyak teman-teman yang ada di lingkungan saya yang mulai berpikir dengan cara seperti itu. Mereka tidak peduli dengan isu-isu masyarakat yang tidak berkaitan dengan dirinya, serta lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Hal ini sangat disayangkan karena saya sangat berharap agar generasi muda ke depannya dapat terus peduli dan memiliki keinginan untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Saya berharap generasi muda dapat memberikan dampak positif sekecil apa pun itu, sesuai dengan kapasitasnya, pada lingkungan di sekitarnya.

Menurut kalian, apa yang diharapkan pemuda dari pemerintah, terutama terkait bisnis start-up?

Westra: Yang kami harapkan adalah semakin terjalannya konektivitas dan kerja sama antara pelaku usaha

start-up dan pemerintah dalam mencapai kepentingan dan tujuan nasional maupun regional. Start-up biasanya dibangun dari ide untuk menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat. Misalnya masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas, maka muncullah *start-up* dalam bidang transportasi seperti Go-Jek, Grab, Uber dan sebagainya. Dalam masalah akses terhadap permodalan yang dihadapi oleh para petani kecil di Indonesia, muncullah start-up seperti Vasham. Kedua hal ini hanyalah contoh bahwa potensi *start-up* yang ada di kawasan ini sangat besar, yang jika kita dorong kerja sama yang baik antara pemerintah dan start-up, maka akan dapat berkontribusi sangat besar dalam penyelesaian masalah yang ada di kawasan.

Dalam hal bantuan, yang paling dibutuhkan *start-up* untuk dapat berkembang yang erat kaitannya dengan pemerintah mungkin ada tiga hal, yaitu regulasi pemerintah terkait operasional, suku bunga, dan stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah dapat membantu start-up dengan tidak mengeluarkan regulasi yang dapat membatalkan *start-up* dalam menjalankan perusahaannya. Jika ada peraturan yang berpotensi bersinggungan dengan *start-up*, pemerintah harus

bisa mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan semua pihak.

Terkait suku bunga, start-up dapat beroperasi dengan adanya injeksi investasi atau pun pinjaman dari bank. Suku bunga yang rendah untuk *start-up* tentunya dapat membantu mereka untuk mendapatkan akses modal yang lebih besar dan pada akhirnya meningkatkan potensi bisnisnya.

Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi juga harus terus dijaga untuk dapat menarik dan mempertahankan investor untuk menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan *start-up* di Indonesia, maupun kawasan ASEAN.

Asyana: Dalam membuat proyek *start-up*, harus ada sinergi antara swasta dengan pemerintah. Jangan ada kepentingan yang saling tumpang tindih dan harus satu visi dan misi. Pemanfaatan sumber daya manusia juga harus optimal. Banyaknya penduduk di ASEAN bisa dilihat sebagai peluang emas. Dengan demikian proyek-proyek *start-up* bisa menjadi salah satu kunci membantu menyelesaikan masalah pengangguran hingga ketimpangan ekonomi.

Peran anak muda sangat vital di sini. Dengan energi dan ide-ide yang dimiliki, mereka bisa diajak untuk menelurkan gagasan-gagasan yang *sustainable*,

sehingga harapannya, proyek *start-up* yang dihasilkan tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN di masa kini, namun juga di masa mendatang.

Pemerintah bisa turun tangan dalam banyak hal, seperti membekali pemuda dengan pendidikan vokasi sesuai bidang yang ingin ditekuni oleh para pemuda maupun bidang lain yang dibutuhkan dan sudah dimulai oleh Bapak Jokowi di Indonesia. Lalu pemerintah bisa juga membantu akses permodalan dan mendukung promosi produk *start-up* di kancah ASEAN maupun internasional. Pemerintah sebaiknya juga mendorong *start-up* untuk turut menggerakkan komponen-komponen lokal dan kebudayaan daerah mengingat ASEAN sangat kaya di bidang tersebut.

Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemuda Indonesia untuk lebih berkarya bagi Indonesia dan ASEAN?

Westra: Memberikan ruang dan kesempatan kepada pemuda untuk berkarya dengan apapun potensi yang mereka miliki tanpa merasa dibatasi. ASEAN dan Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian dan dukungan yang merata bagi semua bidang kreatif yang ada di masyarakat. Ruang untuk berkarya ini juga dapat lebih banyak tercipta dengan adanya sinergi program kerja lembaga pemerintah, asosiasi, komunitas dan perusahaan. Misalnya telah dibentuknya ragam platform kreatif di salah satu perusahaan aplikasi teknologi di Jakarta. Selain itu, dapat membangun pola pikir kreatif melalui berbagai kegiatan, pameran, event, atau perlombaan untuk memacu kreativitas dan rasa ingin berkarya pemuda dan masyarakat pada umumnya. Juga memberikan akses bagi para pemuda untuk dapat bekerja secara kolaboratif dengan pemuda negara lain. Misalnya melalui pelaksanaan program cultural exchange atau expo, entrepreneurship camp, dan innovation jam.

Asyana: Kalau kita dengar lagu Indonesia Raya, Bapak W.R. Soepratman menulis "bangunlah jiwanya" terlebih dahulu, baru "bangunlah badannya". Untuk itu saya percaya,

hal pertama yang harus dipersiapkan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup adalah dengan mempersiapkan mentalnya. Begitu juga dengan manusia Indonesia, dalam hal ini pemuda Indonesia.

Presiden Jokowi sedang giat-giatnya membangun beragam proyek infrastruktur yang canggih. Akses permodalan dan bantuan pendidikan terus digelontorkan. Namun jika tidak disertai dengan kesiapan mental manusianya, semua sarana yang disodorkan tentu tak akan berguna. Para pemuda harus diajak untuk mempersiapkan mentalnya terlebih dulu agar bisa memanfaatkan berbagai sarana dan peluang bagi kepentingan negara dan ASEAN. Kita bisa membantu menyodorkan banyak gambaran mengenai pilihan-pilihan hidup di masa depan kepada anak muda, sehingga mereka punya gambaran ingin berkontribusi apa kelak dalam kancah nasional maupun regional. Misalnya dengan mengajak para profesional dan akademisi untuk menjadi pendidik yang menginspirasi di seluruh penjuru negeri, seperti yg dilakukan komunitas Indonesia Mengajar dan Kelas Inspirasi.

Selain itu, membangun mental para pemuda juga bisa dilakukan melalui ruang-ruang kreasi dan apresiasi, sehingga mereka lebih bersemangat lagi dalam berkarya dan membangun negara dan ASEAN. Seperti ASEAN Coffee Association yang memberikan beasiswa kepada para barista di ASEAN atau menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi barista yang berhadiah untuk memacu semangat para peserta.

Oleh:
Thalita Evani H
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN



Margianta Surahman
Juhanda Dinata

Dok. Pribadi

“ Pemuda Harus Dilihat sebagai Mitra Setara “

Pemuda adalah bagian penting dari populasi di negara mana pun dan membutuhkan perhatian khusus karena mereka merupakan pemimpin masa depan dan katalisator untuk pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memfasilitasi pengembangan pemuda yang efektif, pada pertengahan 2017, ASEAN bekerja sama dengan *United Nations Population Fund (UNFPA)* menghasilkan *ASEAN Youth Development Index (YDI)* sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program terkait pengembangan pemuda.

Untuk melihat lebih dalam keberperanan pemuda ASEAN saat ini, serta hal-hal strategis yang sudah dilakukan ASEAN untuk pemuda, tim redaksi Majalah Masyarakat ASEAN mewawancarai Project Coordinator - Young Health Program Lentera Anak Foundation, Margianta Surahman Juhanda Dinata.

Margianta Surahman Juhanda Dinata atau lebih akrab disapa Gian adalah advokat hak anak. Sejak sekolah menengah atas, ia aktif di forum

hak anak Kota Bogor, Jawa Barat, yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Aktivitasnya di bidang hak anak di tingkat kota, provinsi, dan nasional, membuat Gian terpacu membangun gerakan muda *Framework on Convention Tobacco Control (FCTC)* pada 2016 yang berfokus pada isu pengendalian tembakau.

Pada 2017, Gian juga mendirikan Emancipate Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang berfokus pada masalah perbudakan modern. Menurut dia, ASEAN saat ini adalah raksasa yang tertidur dan akan terbangun tergantung pada bagaimana kita mengelolanya, terutama anak muda. “Pada 2045 kita memiliki Indonesia emas dan bonus demografi. Jika melihat Indonesia dan ASEAN, hal ini sangat strategis. Indonesia akan memiliki banyak pemuda yang siap menjadi angkatan kerja produktif,” kata Gian, yang belajar Ilmu Hubungan Internasional itu.

Gian, 25 tahun, mengatakan itu adalah potensi yang harus dibangun dari sekarang. Ini pula yang membuat ia tertarik untuk berperan lebih jauh dengan membangun jejaring dengan seluruh pemuda di ASEAN. Berikut petikan wawancara Majalah Masyarakat ASEAN dengan Gian.

Apa saja acara kepemudaan ASEAN yang telah diikuti ?

Saya aktif mengikuti acara-acara ASEAN sejak 2017. Saya berkesempatan hadir pada acara *He for She Campaign launch ASEAN*, yang merupakan kampanye UN-Women mengenai kesetaraan gender. Saya juga berkesempatan mengikuti *ASEAN Youth Gathering* yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, yang mengundang perwakilan pemuda se- ASEAN.

Selain itu, acara apa lagi?

Setelah membangun organisasi perbudakan modern, saya diundang pada *ASEAN Community Forum (ASC) ke-3* di Singapura pada 2018, diinisiasi oleh ASEAN Foundation. Saya hadir sebagai perwakilan *Non Governmental Organization (NGO)* termuda saat itu. Menghadiri *ASEAN Youth Engagement Summit (AYES)*, saya berkesempatan menjadi pembicara pada perhelatan besar untuk pemuda di Kawasan ASEAN yang baru dilaksanakan Februari 2019 di Filipina. Saya mendapatkan kesempatan kembali menjadi pembicara di forum *Kids Against Slavery* di Brunei Darussalam dan *Combating Trafficking in Person* pada ASEAN Development Agenda di Myanmar.

Pertemuan mana yang paling menarik dan memberikan dampak langsung, khususnya bagi pemuda di Indonesia?

Salah satu acara yang sangat menarik adalah ASC ke-3 di Singapura pada 2018. Pada acara tersebut terdapat beberapa chamber yang dibagi berdasarkan pilar ASEAN (Ekonomi, Politik Keamanan, dan Sosial Budaya) dan topik-topik tertentu yang butuh perhatian khusus. *Chamber Youth and Education* menjadi chamber pilihan saya. Ini menarik karena apa sih yang

menjadi urgensi anak muda se-ASEAN? Dari forum tersebut saya mendapatkan perspektif baru mengenai ASEAN.

Bagaimana Anda melihat peran pemuda di ASEAN?

Jika ingin melihat partisipasi anak muda di ASEAN, kita harus melihat scaling atau pengukuran skalanya. Secara nasional kita sudah memiliki Indeks Pembangunan Pemuda 2017 dan ASEAN juga telah memiliki *ASEAN Youth Development Index (YDI)* yang baru dirilis tahun lalu. Hal ini cukup membantu untuk mengukur peran pemuda di ASEAN. Namun, inklusivitas dari ASEAN YDI perlu diperhatikan. Perlu dilakukan peningkatan dan pengkajian seberapa banyak anak muda yang ikut terlibat dalam penyusunan indeks tersebut, seinklusif apa indikatornya. Saya kerap menemukan partisipasi pemuda yang *tokenistic*, yaitu ada kecenderungan partisipasi hanya untuk formalitas, hanya terlihat ada partisipasi, partisipasi anak muda tidak bermakna, bahkan kerap kali partisipan tidak diberikan informasi mendalam.

Apakah pemuda sudah cukup baik dan terwakili?

Hal tersebut tentu tidak akan mewakili aspirasi pemuda, tidak ada keterwakilan di dalamnya. Banyak anak muda belum mengetahui secara mendalam mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan ASEAN walaupun dalam penerapannya sudah mengimpelentasikan nilai-nilai di dalamnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama anak-anak muda di ASEAN dan menjadi perhatian khusus bagi ASEAN secara umum.

Bagaimana partisipasi pemuda agar lebih inklusif?

Pertama, anak muda harus mengetahui privilege yang mereka miliki. Selama ini, solusi yang dikemukakan bersifat *one size fits all*, yang mana solusi di Indonesia tidak selalu bisa diterapkan di negara ASEAN lainnya, tidak ada



Dok. Pribadi

“ Anak muda harus mengetahui privilege yang mereka miliki. Selama ini, solusi yang dikemukakan bersifat one size fits all, yang mana solusi di Indonesia tidak selalu bisa diterapkan di negara ASEAN lainnya “

yang *apple to apple*. Kedua, agar lebih inklusif, kita harus banyak melakukan praktik dibanding hanya menceramahi atau mengomentari. Saya pun berkomentar pada acara AYES bahwa keterwakilan pembicara wanita masih sangat sedikit, tidak hanya pada acara tersebut tetapi pada tataran ASEAN kaum laki-laki masih mendominasi. Inklusifitas kaum wanita di ASEAN dalam ruang publik perlu ditingkatkan. Hal ini perlu didukung dengan regulasi dan kebijakan.

Melihat keketuaan ASEAN pada 2019 oleh Thailand, bagaimana pemuda seharusnya menggali dan mengembangkan peluang untuk berperan?

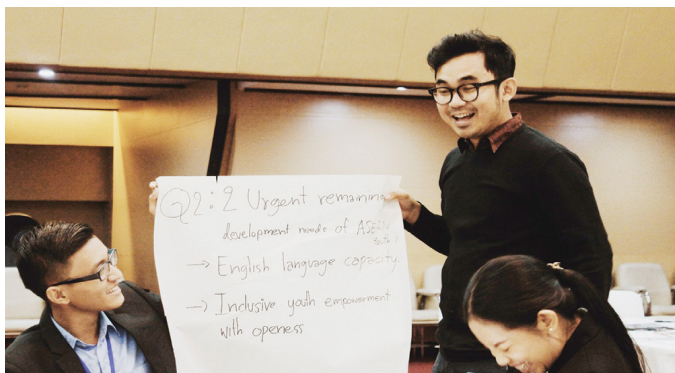
Dengan kata kunci keketuaan Thailand yaitu “Kemitraan”, sangat mungkin menempatkan pemuda sebagai mitra pemerintah di negara masing-masing. Adanya ASEAN YDI memungkinkan pemuda dan pemerintah membahas langkah lebih lanjut, seperti membentuk Rencana Aksi Nasional.

Potensi apa saja yang memungkinkan pemuda Lebih berperan di dalamnya?

Sebagai anak muda kita juga harus melihat potensi yang ada dan harus mengetahui peran apa yang bisa kita manfaatkan. Pemuda harus sadar akan peluang-peluang yang ada dan cerdas memanfaatkan momentum, terutama saat kata kunci yang diangkat adalah “Kemitraan”. Pemuda harus dilihat sebagai mitra yang setara, dengan pemerintah, sektor swasta, atau LSM, karena pemuda harus punya suaranya sendiri dan mereka yang paling tahu menjadi anak muda. Saya mengharapkan anak muda lebih banyak diberi kesempatan berbicara di ruang publik. Melihat persoalan SDGs yang hanya tersisa 11 tahun lagi, lalu perwujudan ASEAN 2025 dalam waktu lima tahun ke depan, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi anak muda mulai saat ini.

Apakah ASEAN sudah benar-benar menjalin kemitraan yang strategis dengan para pemuda?

Selama ini, saya punya pengalaman bermitra dengan ASEAN Foundation karena banyak mengadakan program kepemudaan, di antaranya *ASEAN Youth Video Contest* dan *ASEAN Data Science Explorer (ADSE)*. Saya hadir sebagai juri ADSE. Program ini bertujuan membangun sebuah Pitching Idea melalui kerja sama dengan anak muda.



Dok. Pribadi

“ Sebagai anak muda kita juga harus melihat potensi yang ada dan harus mengetahui peran apa yang bisa kita manfaatkan. Pemuda harus sadar akan peluang-peluang yang ada dan cerdas memanfaatkan momentum “

Apa yang bisa dilakukan ASEAN untuk para pemuda?

Sekretariat ASEAN masih kurang memberikan celah kepada pemuda untuk lebih berperan. Ke depan ASEAN perlu mengukuhkan tempat khusus bagi pemuda. Contohnya di Filipina ada Liga Pemuda dan di Belanda terdapat parlemen anak muda mirip seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pemuda yang memang di dalamnya mereka memiliki suara. Mungkin ASEAN dapat mengadopsi atau membuat tataran seperti itu. ASEAN juga harus memperhatikan keberlanjutan dari program yang sudah dimiliki. Sangat disayangkan potensi anak-anak muda yang sudah berperan di negara-negara ASEAN tidak mendapatkan pengawasan ataupun perhatian untuk keberlanjutannya. Pemerintah perlu memastikan dana yang diinvestasikan untuk pemuda harus bersifat Return on Investment, di mana perlu perencanaan yang baik. Misalnya ada pemuda yang khusus mengurus pembuatan perencanaan, mekanisme, dan mengikuti perkembangannya, serta infrastruktur khusus bagi anak muda jika ASEAN ingin serius bermitra dengan anak muda.

Apakah radikalisme menjadi ancaman bagi anak muda ASEAN?

Mengutip filosofi agama Budha Trihita Karana, yang pertama adalah harmony with people, harmony with nature, dan harmony with spirituality. Maksudnya, kita sebagai sesama manusia harus membangun relasi damai tanpa konflik horizontal. Permasalahan ini tidak harus dibawa ke ASEAN Regional Forum atau disekuritisasi. Mungkin sebagian orang akan berpikir itu adalah cara yang tepat. Saya lebih menyukai hal yang sifatnya preventif. Hal yang mengutama adanya radikalisme, karena pada dasarnya beberapa orang sangat takut terhadap perbedaan. Berikan dampak positif bagi ASEAN?

Bagaimana dengan hoax? Apakah juga menjadi ancaman?

Literasi media, khususnya bagi anak muda, harus dibarengi dengan etika bermedia sosial, mengedepankan persahabatan dengan keberagaman, menerima perbedaan dengan baik, menyadari bahwa segala sesuatu tidak harus diseragamkan. Ada kata sepakat untuk tidak sepakat.

Apa *tips* dan *skill* yang harus dimiliki anak muda zaman now untuk aktif berperan dan mem *Do what we can with what we have*. Kadang pemuda lebih banyak berpikir alasan mengapa kita harus tidak berperan dibanding apa yang bisa kita perankan atau lakukan. Hal besar akan selalu dimulai dari hal yang paling kecil. Budaya instan saat ini justru terkadang membuat pemuda tidak memikirkan prosesnya. Awalnya, saya pun tidak memiliki keterampilan *public speaking* dan tidak pernah mengira saya mendapatkan kesempatan mewakili anak muda Indonesia untuk berbicara di depan dua ribu orang dari 193 negara. *Break the ideas* bahwa kita harus memiliki alasan yang keren. “Patah hati” adalah salah satu alasan saya eksis di ASEAN.

Apa makna alasan tersebut?

Memang bukan suatu alasan yang keren. Banyak anak muda berpikir, “Wah saya gak akan bisa



<https://www.vpi-inc.com>

seperti dia". Tetapi kita selalu bisa membangun narasi kita sendiri dan intinya mulai dulu dengan apa yang kita punya. Hubungkan polanya, baru dari sana kita dapat menemui latar belakangnya. Jadi, *whatever it is you wanna do just do it* karena tidak ada alasan bagi anak muda untuk tidak melakukan sesuatu.

Saya juga menghadapi jalan yang cukup sulit. Banyak orang meremehkan FCTC karena kami melawan raksasa besar, yaitu perusahaan rokok. Banyak orang tidak mendukung gerakan ini. Melalui gerakan muda FCTC, saya mengumpulkan 11.023 surat petisi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo. Satu suratnya berasal dari anak muda se-ASEAN yang berisi kekhawatiran anak muda mengenai bahaya rokok.

Bagaimana respons Presiden Jokowi?

Hal ini mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Presiden Jokowi dengan membuat rapat terbatas mengenai FCTC dan mengundang menteri-menterinya. Tidak disangka melalui petisi tersebut FCTC mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Saya percaya *butterflies effects*, yaitu satu kepankan kecil di satu tempat dapat membuat badai di tempat lain. Pemerintah dapat melakukan hal kecil kepada pemuda di ASEAN, seperti mendapatkan kesempatan untuk *exchange*, mendapatkan bantuan dana

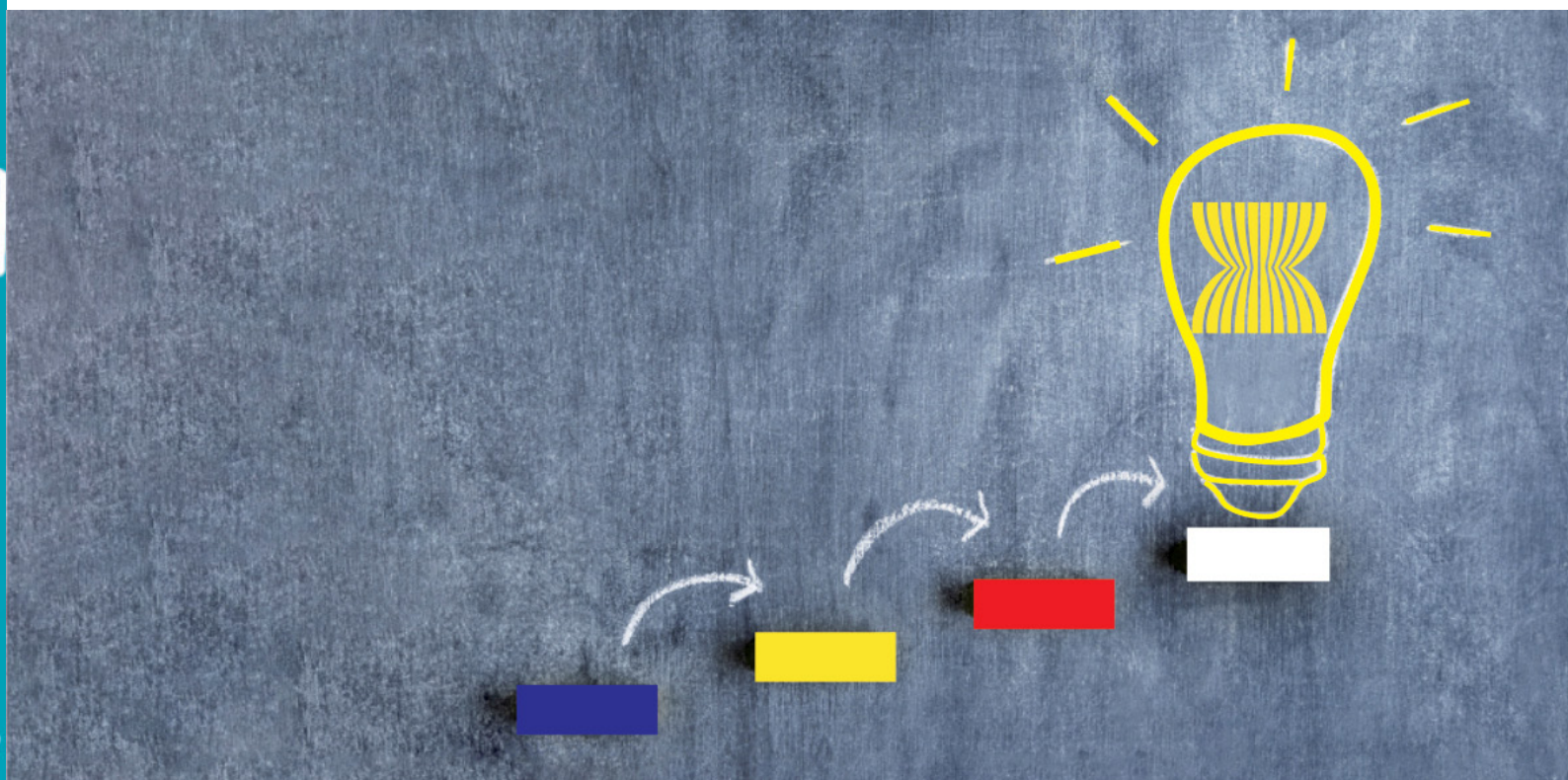
untuk *start up*, NGo, memberikan mereka ruang untuk berbicara dan infrastruktur yang jelas. Kelihatannya kecil tapi efeknya akan besar, bahkan berkali-kali lipat besarnya. *Networking skill is the new currency* karena ada keleluasaan dalam berjejaring di dalamnya. Kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap. Semakin banyak tempat yang dapat dikunjungi pemuda serta memberikan kontribusi yang jelas tentu akan membangun kemampuan kita sebagai pemuda untuk berjejaring.

Oleh:
Syifa Fauzi Almushally
 (Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN)

BEASISWA

Mengintip
Beasiswa dari
Mitra ASEAN





Terdapat lebih dari 213 juta pemuda usia 15-34 tahun di negara-negara ASEAN, pada 2017. Ini merupakan angka kelompok pemuda ASEAN terbesar yang pernah ada. Pengembangan kualitas pemuda menjadi penting karena pemuda akan menjadi pemimpin bangsa. Salah satu penguatan kualitas pemuda adalah melalui pendidikan. Menanggapi potensi ini, ASEAN bersama Mitra Wicaranya bekerjasama memberikan beasiswa kepada pemuda dan pelajar ASEAN

Hingga saat ini, ASEAN memiliki 11 Mitra Wicara (Dialogue Partners), yaitu: Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ASEAN juga memiliki hubungan Mitra Wicara Sektorial dengan Pakistan, Norwegia, Swiss dan Turki.

Selain melalui mekanisme

kerjasama ASEAN+1 dengan masing-masing Mitra Wicara, ASEAN menjalin mekanisme kerja sama seperti *ASEAN Plus Three (APT)* dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang dan Korea Selatan; *East Asia Summit (EAS)* dengan 18 negara peserta; serta *ASEAN Regional Forum (ARF)* dengan 27 negara partisipan. ASEAN juga menjalin dialog dan kerja sama dengan organisasi kawasan dan internasional seperti *Community of Latin American and Caribbean States (CEALAC)*, *Gulf Cooperation Council (GCC)*, *Mercado Común del Sur/ Common Market of the South (MERCOSUR)*, *Economic Cooperation Organization (ECO)*, *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)* dan

Pacific Alliance (PA).

Penawaran Beasiswa dari Negara Mitra ASEAN

ASEAN-Jepang

Di bidang sosial budaya, ASEAN dan Jepang menekankan kerja sama *people-to-people* contact dan pertukaran budaya, khususnya antar pemuda dan intelektual, di antaranya melalui program *Japan East-Asia Network of Exchange for Student and Youths (JENESYS)* dan *Japan Foundation*.



JENESYS bertujuan meningkatkan saling pengertian antara pemuda ASEAN dan Jepang serta meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Fokus areanya meliputi budaya dan masyarakat, teknologi, olahraga dan lain-lain. Kegiatannya meliputi kunjungan kesitus dan institusi pendidikan, homestay, dan kegiatan kelompok.

(Untuk informasi lebih lanjut: <http://sv2.jice.org/jenesys/e/about-jenesys/about-program/>)

Japan Foundation mengadakan program di empat bidang utama, yaitu Pertukaran Seni dan Budaya, Pendidikan Bahasa Jepang di Luar Negeri, Studi Jepang dan Pertukaran Intelektual, serta Penguatan Pertukaran Budaya di Asia.

(Untuk informasi lebih lanjut: <https://www.jp.go.jp/e/about/index.html>)

ASEAN-Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan menawarkan beasiswa kepada pelajar ASEAN melalui skema beasiswa *Korean Government Scholarship Program (KGSP)*. Pemerintah Korea Selatan akan menanggung seluruh biaya, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup. Mahasiswa internasional yang menerima beasiswa ini akan mengikuti kursus bahasa Korea selama 1 tahun di kampus masing- masing.

(Untuk informasi lebih lanjut: http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do)

ASEAN-Tiongkok

Untuk mempromosikan saling pengertian, kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang antara Pemerintah Tiongkok dan ASEAN, pemerintah Tiongkok telah menetapkan serangkaian program beasiswa untuk mensponsori siswa internasional, guru dan sarjana untuk belajar dan melakukan penelitian di universitas-universitas di Tiongkok.

Pemerintah Daerah Otonomi Guangxi Zhuang memberikan beasiswa kepada siswa dari negara-negara ASEAN melalui mekanisme Guangxi Government Scholarship for ASEAN Students. Beasiswa tersebut untuk menempuh pendidikan tinggi (sarjana, magister atau PhD) atau melakukan penelitian ilmiah di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Guangxi. (www.mo.weixin.qq.com)

ASEAN-Australia

Dalam bidang pendidikan, Australia merupakan salah satu tujuan utama pelajar dari negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2016, total pelajar ASEAN yang menempuh pendidikan di Australia mencapai 130.000. Beasiswa yang ditawarkan antara lain Australia Awards ASEAN Scholarships.

(Untuk informasi lebih lanjut: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-awards-indonesia-information-for-intake>).



SYARAT DAN KETENTUAN

NEW ZEALAND-ASEAN SCHOLAR AWARDS



Para pelamar harus:

- BERUSIA 18-39 TAHUN
- DOMISILI DI INDONESIA (MIN. 2 TAHUN TERAKHIR)
- MEMILIKI PENGALAMAN BEKERJA (MIN. 1 TAHUN *FULL TIME*)
- KEMBALI KE INDONESIA SETELAH SELESAI STUDI



Beasiswa mencakup:

- BIAYA KULIAH, *SETTLEMENT*, DAN HIDUP
- TIKET PESAWAT
- ASURANSI KESEHATAN
- VISA PELAJAR
- BIAYA TEST IELTS DAN *ENGLISH LANGUAGE TRAINING*



Informasi dan dokumen yang dibutuhkan:

- MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
- SKOR IELTS (MIN. 6.5) / TOEFL (MIN. 90)
- FOTOKOPI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK (BHS. INGGRIS)
- AKREDITASI KAMPUS (BHS. INGGRIS)



Deadline

PENDAFTARAN *ONLINE* DI WEBSITE
[HTTPS://GOO.GL/34CDDH](https://goo.gl/34CDDH)

MULAI 1 MARET-14 MARET 2019



ASEAN - Selandia Baru

ASEAN dan Selandia Baru melakukan cukup banyak kerja sama dalam bidang pendidikan dan kepemudaan. Dalam program *ASEAN Young Business Leaders Initiative (YBLI)*, selama 2015-2017 tercatat sebanyak 31 pebisnis muda ASEAN telah mengunjungi Selandia Baru dan 11 pebisnis muda Selandia Baru mengunjungi negara anggota ASEAN. Selandia Baru juga memberikan beasiswa pasca sarjana setiap tahun kepada mahasiswa negara anggota ASEAN untuk kuliah di Selandia Baru melalui skema beasiswa *New Zealand ASEAN Scholarships (NZAS)* dan 100 beasiswa pelatihan bahasa Inggris in-country kepada Kamboja, Indonesia, Laos, dan Myanmar. *ASEAN Young Diplomats Study Tour* ke Selandia Baru telah berlangsung sejak 2016, yang diikuti 10 diplomat muda dari negara anggota ASEAN setiap tahunnya.



BEASISWA ASEAN-UNI EUROPA (EU SHARE)

KRITERIA PERSYARATAN:


- Mahasiswa aktif* (min. 2 semester)
- WNI
- Memiliki Letter of Acceptance dari Universitas yang dituju*
- Memiliki Letter of Endorsement dari Universitas asal
- Transkrip akademik (Bhs. Inggris)
- Fotokopi paspor yang valid
- Foto terbaru (uk. paspor)

*) Terdaftar sebagai Universitas yang berpartisipasi

CAKUPAN BEASISWA *:

- Biaya kuliah, hidup, visa dan tinggal
- Tiket pesawat PP
- Asuransi kesehatan
- Bahan studi

*) Durasi beasiswa untuk 1 semester

ASEAN-Uni Eropa

Program beasiswa dari Uni Eropa adalah melalui mekanisme SHARE. Diluncurkan secara resmi pada Mei 2015, SHARE adalah program yang didanai sebesar € 10 juta oleh Uni Eropa. Mulai 2016, SHARE memberikan sekitar 500 beasiswa bagi mahasiswa ASEAN melalui pertukaran pelajar. SHARE membantu mewujudkan cita-cita ASEAN untuk membangun ruang pendidikan tinggi di kawasan. Program ini disepakati diperpanjang selama 2,5 tahun kedepan terhitung mulai Oktober 2019.



ASEAN-Amerika Serikat

Terdapat dua program beasiswa yang ditawarkan oleh Amerika Serikat untuk ASEAN, *the Fulbright US-ASEAN Visiting Scholar Initiative* dan *Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)*. *The Fulbright US-ASEAN Visiting Scholar Initiative* memberikan kesempatan bagi warga negara dari sepuluh negara ASEAN berkunjung ke Amerika Serikat dan melakukan penelitian ilmiah dan profesional selama 3-4 bulan pada isu-isu prioritas hubungan AS-ASEAN dan ASEAN pada umumnya. Sedangkan, YSEALI adalah program pemerintah AS untuk memperkuat pengembangan kepemimpinan dan networking di Asia Tenggara melalui berbagai program, termasuk pertukaran pendidikan dan budaya.

Untuk informasi lebih lanjut: <https://www.aminef.or.id/grants-for-indonesians/fulbright-programs/fellowships/fulbright-us-asean-visiting-scholar-initiative-program/> (untuk Fulbright US-ASEAN Visiting Scholar Initiative); <https://id.usembassy.gov/education-culture/yseali/yseali-academic-fellows/> (untuk YSEALI)



CANADA-ASEAN

SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL FOR DEVELOPMENT (SEED)

DEADLINE: 5 MARET 2019

STUDI JANGKA PENDEK DI LEMBAGA POST-SECONDARY
TINGKAT SARJANA DAN PASCASARJANA



PENERIMA BEASISWA

- Mengumpulkan *motivation letter*
- Mahir dalam bahasa pengantar studi (Prancis atau Inggris)
- Tidak boleh memiliki beasiswa lain yang bersumber dari pemerintah Kanada
- Tiba di Kanada pada bulan September untuk semester musim gugur dan Januari untuk semester musim dingin
- Harus tiba di Kanada pada tanggal 1 Agustus 2019 atau paling lambat tanggal 1 Februari 2020 untuk pengambilan penghargaan



NILAI BEASISWA

Penerima beasiswa berhak untuk mengklaim biaya-biaya berikut:

1. Aplikasi Visa/ studi/ izin kerja
2. Tiket pesawat
3. Asuransi kesehatan
4. Biaya hidup
5. Biaya Transportasi darat- termasuk pass transportasi umum
6. Buku dan persediaan yang diperlukan untuk studi

PERSYARATAN UMUM

- Merupakan warga negara dari 10 anggota ASEAN
- Belum pernah berpartisipasi dalam program beasiswa pertukaran dari pemerintah Kanada
- Memilih bidang studi yang selaras dan berkontribusi pada Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan
- Menyertakan *letter of intent*



TIPE-TIPE BEASISWA

- CAD 10.200 untuk mahasiswa, sarjana, atau pascasarjana (Magister dan PhD) selama minimum empat bulan atau satu masa studi atau penelitian akademik;
- CAD 12.700 untuk mahasiswa pascasarjana (Master dan PhD) untuk periode lima hingga enam bulan studi atau penelitian; atau
- CAD 15.900 untuk mahasiswa sarjana dan perguruan tinggi untuk jangka waktu delapan bulan atau dua masa studi akademis atau penelitian



INFORMASI LEBIH LANJUT
[HTTPS://WWW.SCHOLARSHIPS-BOURSES.GC.CA/SCHOLARSHIPS-BOURSES/CAN/INSTITUTIONS/ASEAN-ANASE.ASPX?LANG=ENG](https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng)

DIREKTORAT KERJA SAMA EXTERNAL ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



© 2019

ASEAN-Kanada

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) merupakan program beasiswa yang bertujuan mencapai the 2030 Agenda for Sustainable Development. Program ini menyediakan kesempatan pertukaran jangka pendek dalam rangka studi maupun riset di institusi-institusi pendidikan tinggi di Kanada bagi masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Kanada menawarkan program SEED kepada mahasiswa negara anggota ASEAN sejak 2017 untuk lima tahun kedepan.

Kanada telah berkomitmen menyediakan beasiswa sebesar CAD\$ 10 juta untuk mahasiswa S1 dan S2 yang ingin melakukan program studi / penelitian singkat di Kanada. Pemerintah Kanada akan menyediakan pula program beasiswa yang terbuka untuk *mid-career professional*.

Untuk periode 2019, proses pendaftaran sudah ditutup pada 5 Maret 2019 lalu. Negara anggota ASEAN diharapkan dapat memanfaatkan secara lebih optimal program ini pada periode berikutnya. Informasi terkait pendaftaran, proses seleksi dan detail keterangan lainnya dapat diakses pada tautan ini: <https://www.scholarships-bourses.gc.ca/>

Selain beasiswa-beasiswa tersebut, masih banyak mekanisme beasiswa lainnya yang ditawarkan oleh Mitra ASEAN. Sebagai bagian dari ASEAN, pelajar Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan beasiswa tersebut secara maksimal. Populasi Indonesia saat ini cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 14-64 tahun) yang jumlahnya mencapai 179,13 juta jiwa (67,6%). Jumlah usia produktif Indonesia menunjukkan besarnya pasar tenaga kerja di Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan keahliannya untuk menjaga daya saingnya dan tidak tertinggal oleh tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja adalah melalui pendidikan. Pendidikan akan melahirkan generasi penerus siap kerja dan siap bersaing untuk memajukan Indonesia.

Oleh :
Fransisca DP
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN
Maret 2019

MENANGANI SAMPAH LAUT, ASEAN MENOLAK DIAM

Jurnal of Science edisi Februari 2015 melaporkan, dari sepuluh negara teratas penyumbang polusi sampah plastik di laut, lima di antaranya anggota ASEAN. Indonesia menduduki posisi kedua secara global dan teratas di ASEAN

Berdasarkan hasil penelitian University of Georgia pada 2010, jurnal of Science mempublikasikan daftar sepuluh negara teratas yang secara total “membuang” sekitar 9,06 juta ton sampah plastik di laut. Lima negara anggota Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) masuk dalam daftar tersebut. Indonesia, Filipina, dan Vietnam berada di urutan 2-4, Thailand di posisi keenam, dan Malaysia di tempat kedelapan.

Perputaran arus laut menyebabkan sampah plastik, terutama dari benua Asia, terkumpul di wilayah Pasifik Utara. Wilayah yang dikenal sebagai Pulau Sampah Terapung Pasifik (Great Pacific Garbage Patch) yang luasnya mencapai ratusan ribu kilometer persegi, bergantung pada kondisi arus laut.



Grafik 1: negara dan jumlah sampah plastik (dalam juta ton)

Masih berdasarkan publikasi data yang sama, kelima negara ASEAN tersebut secara total menyumbang 3,55 juta ton sampah plastik di laut. Sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang, terbuka kemungkinan jumlah



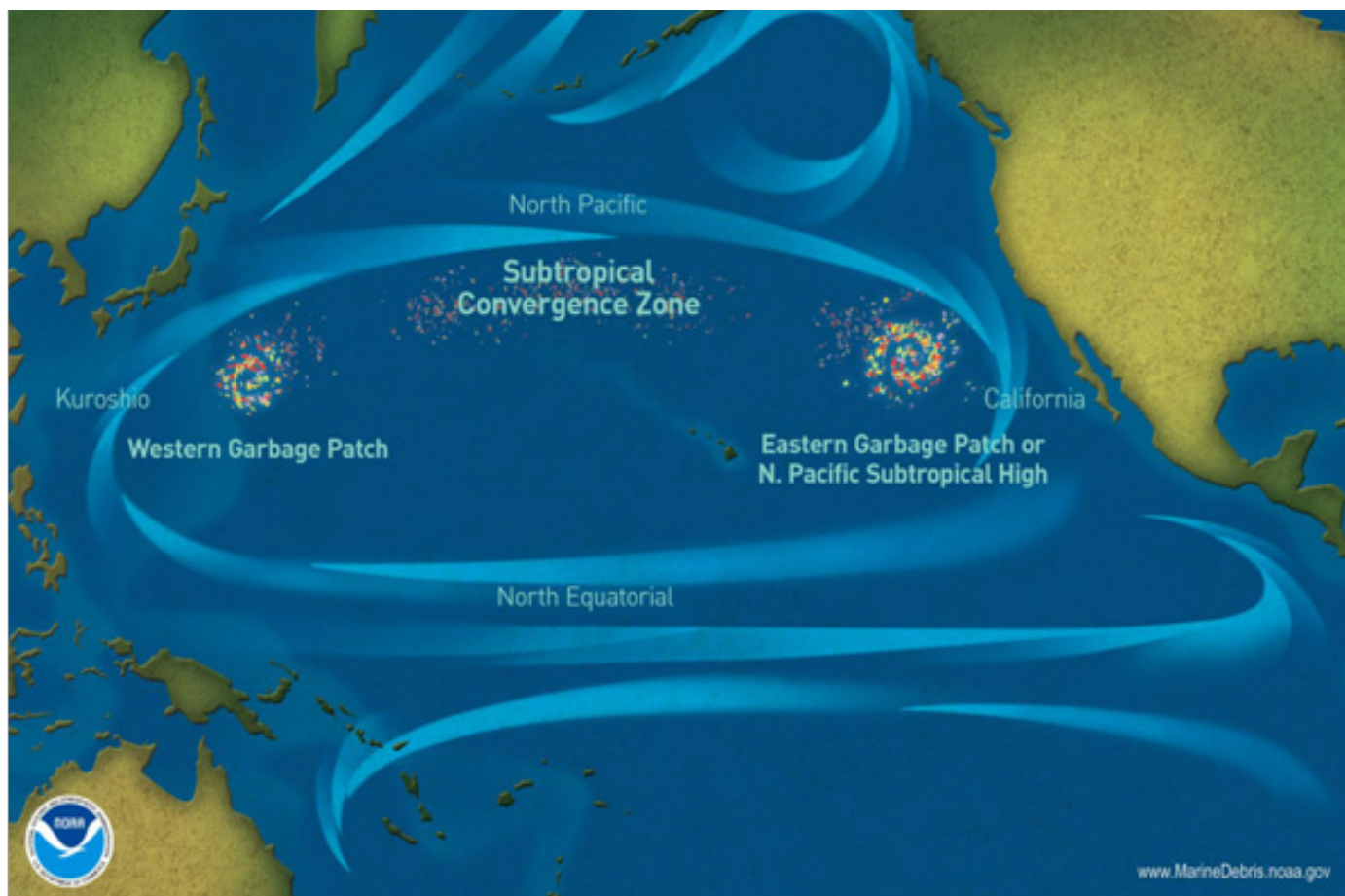


Foto 1: peta Great Pacific Garbage Patch (National Oceanic and Atmospheric Administration)

sampah plastik dari negara-negara ASEAN akan terus bertambah seiring meningkatnya populasi, industrialisasi, dan konsumsi barang dalam kemasan. Pemandangan horor di Pasifik Utara belum mencakup seluruh masalah sampah laut global. Sampah plastik bukan satu-satunya pencemar laut. Para praktisi lingkungan hidup juga tengah dipusingkan oleh peralatan menangkap ikan yang hanyut atau sengaja dibuang di laut, jaring-jaring tangkap tak bertuan yang populer dengan sebutan ghost gear. Global Ghost Gear Initiative (GGGI) yang dimulai pada 2015 memperkirakan 10% dari total sampah laut adalah ghost gear.



Foto 2 : Great Pacific Garbage Patch (AFP)

ASEAN Tidak Tinggal Diam, Indonesia Bergerak Aktif

Dengan lima anggotanya masuk dalam daftar penyumbang sampah laut terbanyak, ASEAN menyadari aksi nyata bersama diperlukan untuk menangani masalah sampah laut di kawasan. "Penanganan marine debris merupakan salah satu program prioritas keketuaan Thailand di ASEAN tahun ini," kata Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri, Riaz Saehu, merujuk pada tema keketuaan ASEAN 2019 yaitu "Advancing Partnership for Sustainability".

Para menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN bertemu di Bangkok pada 4-5 April 2019 untuk mengukuhkan bukan hanya komitmen tetapi juga rencana aksi penanganan sampah laut. Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris (SAMM-MD) tersebut adalah realisasi ide untuk menggerakkan ASEAN bersama-sama menangani sampah laut yang beredar sejak awal 2017. Ide itu pula yang

mendorong pembicaraan lintas stakeholders isu sampah laut melalui ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region yang berlangsung di Phuket, Thailand, 22-23 November 2017.

Sebagai negara dengan wilayah perairan terluas di ASEAN, Indonesia telah bergerak maju dalam menangani sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. "Melalui kontribusi aktif dalam inisiatif ASEAN, kami ingin menularkan semangat yang dimiliki Indonesia kepada negara anggota ASEAN lainnya," kata Riaz. Ia menambahkan Indonesia tidak hanya akan menularkan semangat tapi juga membagi pengalaman dan pengetahuan penanganan sampah laut. "Kita sangat mampu dalam hal ini."

Kemampuan Indonesia ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, yang mewakili menteri LHK sebagai ketua



Foto 3: para Head of Delegation Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris berfoto bersama perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, 5 Maret 2019



Dok. www.lpmqalamun.id

delegasi Indonesia pada SAMM-MD. "Indonesia telah mengimplementasikan langkah 3R: *reduce, reuse, recycle* dan *circular economy* dalam pengelolaan sampah. Dengan langkah ini, Indonesia menargetkan tahun 2025 tercapai pengurangan 30% produksi sampah di sumbernya dan 70% sisanya ditangani dengan daur ulang dan *energy recovery*," kata Rosa dalam pernyataannya pada forum SAMM-MD. "Kami mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk ikut menggiatkan upaya masing-masing dalam bentuk kebijakan nasional dan penerapan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya nasional ini selanjutnya diangkat dalam kolaborasi antar negara ASEAN maupun dengan negara-negara maju untuk secara efektif mengurangi sampah laut di kawasan," katanya masih dalam pernyataan yang sama.

Dalam hal kerja sama dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, ASEAN sebenarnya sudah memiliki deklarasi komitmen dalam bentuk East Asia Summit Leaders Statement on Combating Marine Plastic Debris yang disahkan pada East Asia Summit ke-13 pada 15 November 2019. Deklarasi ini memuat langkah lanjutan berupa pembuatan sebuah rencana aksi kawasan

(regional plan of action / RPOA) untuk menangani pencemaran sampah plastik di laut.

Kabar Baik dari Nairobi

4th United Nations Environment Assembly (UNEA-4) yang berlangsung di Nairobi, Kenya, 11-15 Maret 2019 menghasilkan 23 resolusi. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya adalah usulan Indonesia, termasuk resolusi Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities. Melalui resolusi ini, dunia menyepakati sampah laut harus ditangani secara terintegrasi dari sumbernya di darat mengingat sekitar 80% sampah laut berasal dari kegiatan di darat.

Resolusi tersebut mencatat upaya Indonesia mendirikan sebuah *regional centre* untuk peningkatan kapasitas (*capacity building*) penanganan sampah laut yang direncanakan berlokasi di Bali. "Sekali lagi, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak tinggal diam," kata Riaz Saehu.

Oleh :
Bayu P. Oktavriyanto
(Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya
ASEAN)

ICONAS 2019 Digelar di Universitas Gadjah Mada



Dok. Kementerian Luar Negeri

YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri bersama dengan Pusat Kajian ASEAN Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan *Center for Asian Legal Exchange (CALE)* Universitas Nagoya, Jepang, menyelenggarakan *International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2019*. Konferensi dengan tema "*Rethinking Law, Institution and Politics in Advancing Partnership for Sustainable ASEAN Community*" itu digelar di kampus UGM pada 13-14 Maret 2019.

Konferensi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan UGM Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. Dalam sambutannya, Djagal mengatakan ICONAS telah digelar sejak 2014, tapi terhenti penyelenggaraannya sejak 2016. Djagal memberikan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, yang mendukung terselenggaranya kembali ICONAS pada tahun ini.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Jepang untuk ASEAN H.E. Kazuo Sunaga menyampaikan berbagai capaian kerja sama ASEAN-Jepang yang sudah terjalin selama 45 tahun. Sunaga juga menekankan peran penting

ASEAN sebagai mitra strategis Jepang, terutama untuk mewujudkan kebijakan Free and Open Indo-Pacific Strategy.

Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Vedi Kurnia Buana, yang mewakili Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, mengatakan bahwa politik, kelembagaan, dan hukum ASEAN harus dapat mengatasi berbagai tantangan yang tidak berkesudahan. Menurut Vedi, terdapat tiga isu yang perlu menjadi perhatian civitas academica. Ketiga isu tersebut adalah kepentingan untuk menjaga keberhasilan, sentralitas, dan kesatuan ASEAN; menghapuskan kesenjangan antara komitmen di tingkat regional dan implementasi di tingkat nasional; serta bagaimana memperkuat kesediaan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan di antara negara secara damai melalui mekanisme penyelesaian yang tepat.

Vedi juga mengimbau para akademisi untuk mengangkat isu berkenaan dengan dua mandat yang tercantum dalam Cetak Biru Kerja Sama Politik-Keamanan ASEAN 2025. Mandat yang dimaksud adalah pemajuan pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi mengenai sistem hukum di masing-masing negara anggota



Dok. Kementerian Luar Negeri

ASEAN dan instrumen hukum yang terkait dengan Masyarakat ASEAN, serta pelaksanaan studi banding bagi para perumus kebijakan mengenai proses perundangan peraturan dan hukum.

ICONAS 2019 menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi seperti Profesor Obata Kaoru dari *Graduate School of Law* Universitas Nagoya; Dr. Dafri Agussalim, Direktur Pusat Kajian ASEAN UGM; Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M dari Fakultas Hukum UGM; Profesor Shimada Yuzuru dari *Graduate School of International Development* Universitas Nagoya; Dr. Poppy S. Winanti, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM; dan Prof. Dr. Thomas Schmitz, pengajar dari *German Academic Exchange Service (DAAD)* di Fakultas Hukum UGM.

Para narasumber mengulas isu dalam kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN yang terbagi menjadi dua panel diskusi. Panel diskusi pertama mengangkat tema "Law, Norms and Human Rights in ASEAN", sedangkan panel diskusi kedua membahas tentang "*Institutional and Political Economy of ASEAN: A Comparative Perspective*". Beberapa isu yang diangkat dalam pembahasan

tersebut adalah prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN, perlindungan dan pemajuan HAM di kawasan, perkembangan negosiasi dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, serta peningkatan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

ICONAS merupakan konferensi akademik yang selama ini dimanfaatkan sebagai forum diskusi antar pemangku kepentingan. ICONAS 2019 diikuti oleh 263 peserta dari berbagai bidang keilmuan. Terdapat 35 kajian isu yang dipaparkan secara paralel dalam tiga kluster diskusi, yaitu kluster isu Masyarakat Politik-Kemampuan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Hasil kajian dalam ICONAS 2019 akan disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan yang dipublikasikan dan didistribusikan kepada lembaga terkait di ASEAN.

Oleh :
Ivorry Chaka Nathara Pranashanti
(Sekretariat Direktorat Jenderal
Kerjasama ASEAN)



Peran pemuda tidak pernah bisa terlepas dari kemajuan suatu bangsa atau kawasan regional. Tidak dapat dipungkiri, ide-ide segar yang mengalir dari darah muda selalu menjadi pendobrak dalam melihat sebuah paradigma, mengingat jumlah pemuda di kawasan Asia Tenggara tidak sedikit. Berdasarkan ASEAN Statistical Yearbook 2018, jumlahnya mencapai 158,3 juta atau 25% dari total populasi ASEAN.

Karena itu, pemuda, khususnya pemuda Islam, seharusnya dapat berperan mengubah pemikiran masyarakat yang sangat skeptis bahkan radikal terhadap kehadiran Islam di dunia.

Asia Tenggara sebagai kawasan yang masyarakatnya memeluk beragam agama, seperti Islam, Buddha, Katolik, Protestan, Hindu, dan Konfusius, pada dasarnya sudah memiliki nilai toleransi yang baik. Ini berkat interaksi antar masyarakat jauh sebelum kolonialisme menginjakkan kaki di Asia Tenggara. Namun, media di masa kini terlalu menyudutkan Islam sebagai agama yang mengancam perdamaian dunia. Bahkan tidak sedikit yang punya pemikiran bahwa Islam sama dengan radikalisme dan terorisme.

Lantas, bagaimana pemuda Islam dapat memberikan jawaban atas perspektif media yang cenderung bias? Permasalahan ini telah disampaikan oleh Riaz J.P Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri dalam seminar internasional bertema "Shaping the Future Generation of ASEAN", yang merupakan rangkaian kegiatan 10th Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) pada tanggal 28 Maret 2019 di IAIN Bengkulu .

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi masyarakat muslim ASEAN dan harus segera diluruskan adalah stereotip negatif terhadap Islam dan muslim. Islam yang dicerminkan oleh kartun politik di Eropa dan radikalisme yang bermunculan di berita bukanlah Islam yang diketahui dan dikenal di Asia Tenggara. Sayangnya, cakupan media sangat terbatas. Masyarakat sering kali melihat muslim, Arab, Timur Tengah adalah hal yang sama. Islam akhirnya menjadi simbol yang diasosiasikan dengan Timur Tengah.

Radikalisme adalah ancaman yang dihadapi masyarakat ASEAN. Hal yang akhir-akhir ini sering kita jumpai adalah fenomena *negative stereotyping*, yang sangat merusak tatanan masyarakat. Ditambah juga dengan perkembangan teknologi dan sosial media yang mempermudah akses masyarakat terhadap konten negatif, radikal, dan memecah belah masyarakat.

“ Bagaimana Pemuda Islam dapat memberikan jawaban atas perspektif media yang cenderung bias? “

Karena permasalahan radikalisme ini, penting untuk mempromosikan Islam kepada masyarakat ASEAN guna memerangi ketakutan global terhadap radikalisme dan mempromosikan peran ASEAN di dunia Islam. Tapi, untuk memerangi radikalisme terhadap Islam, kita harus mengeliminasi stereotip negatif kepada masyarakat muslim. Ada tiga stereotip yang acap kali muncul kepada masyarakat Islam di Asia Tenggara, yaitu mispersepsi hukum Islam atau hukum syariah, sekolah agama Islam, dan radikalisme secara umum. Stereotip tersebut memperlambat tumbuhnya rasa toleransi dan moderasi di kawasan.

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang istimewa karena kita hidup di komunitas di mana toleransi, moderasi, dan harmoni adalah kebutuhan sesama untuk menciptakan perdamaian. Namun, dalam menciptakan norma toleransi dan bebas beragama, diperlukan dialog antar agama dan menyuarakan moderasi di kawasan.

Tidak dapat dielakkan pendidikan memainkan peran signifikan untuk membentuk masyarakat tangguh dan berwawasan luas. Pendidikan berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan moderasi dapat disampaikan melalui kurikulum-kurikulum disekolah maupun pendidikan tinggi. Diharapkan pendidikan dapat menjadi wujud agar pemuda di ASEAN mampu membawa perdamaian di kawasan dengan menjadi generasi yang memimpin inovasi dan kreasi untuk ASEAN yang satu visi, satuidentitas, dan satu komunitas.

Selain itu, dalam memerangi radikalisme, pemuda dapat mempromosikan peran pemuda



Islam di ASEAN untuk menghilangkan *negative stereotyping*. Perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat dicapai dengan kehadiran ASEAN di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi, khususnya Internet, juga dapat melancarkan kegiatan promosi mengenai peran pemuda Islam di ASEAN, sekaligus menghapuskan *negative stereotyping*.

Dalam tataran organisasi regional, ASEAN mencoba menyelesaikan permasalahan radikalisme dengan terbentuknya Deklarasi Budaya Preventif atau *Declaration Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society* yang disahkan pada 2017. Deklarasi budaya ini mengadopsi pendekatan secara menyeluruh dan lintas sektor untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, pemahaman antar budaya, serta penghormatan terhadap kehidupan dan keberagaman. Budaya preventif yang berhubungan dengan toleransi dan pemuda adalah Budaya Perdamaian dan Pemahaman antar Budaya, Budaya Rasa Hormat kepada Semua, dan Budaya Mendukung Nilai-Nilai Moderasi.

Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan untuk memerangi radikalisme dan mempromosikan Islam yang damai, harus bersumber dari masing-masing pribadi dan mau menularkan rasa kebaikan tersebut kepada sesama umat manusia. Penyelesaian akar masalah radikalisme tidak bisa diselesaikan sendiri, dengan satu kegiatan, namun harus melakukan pendekatan secara holistik agar perdamaian di kawasan ASEAN terwujud.

“ Permasalahan utama yang saat ini dihadapi masyarakat muslim ASEAN dan harus segera diluruskan adalah stereotip negatif terhadap Islam dan muslim. Islam yang dicerminkan oleh kartun politik di Eropa dan radikalisme yang bermunculan di berita bukanlah Islam yang diketahui dan dikenal di Asia Tenggara “

Oleh:
Fadilla Rahmatan Putri
 (Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN)

Atraksi menawan pengundang Pelancong ke Negeri Gajah Putih



Thailand merupakan salah satu destinasi wisata populer di dunia. Bangkok, Phuket, Pattaya atau Krabi akrab terdengar di telinga kita. Banyak hal yang ditawarkan Negeri Gajah Putih ini kepada para pelancong: keindahan alam, budaya, agama, makanan, olah raga, hingga pusat kesehatan dan kebugaran. Berikut, destinasi-destinasi wisata Thailand yang menarik untuk dikunjungi.

Bangkok

Tidak hanya terkenal sebagai ibukota negara Thailand, Bangkok juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit di dunia. Jumlah wisatawan yang membanjiri kota ini terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai atraksi wisata menarik ditawarkan di Ibu Kota ini. Yang paling utama adalah bangunan-bangunan bersejarah, seperti candi dengan seni dan arsitektur yang kompleks. Selain itu juga terdapat istana, museum, taman dan beragam tempat belanja, mulai dari mall, pasar loak, hingga pasar jalanan. Bangkok pada malam hari juga menarik untuk dinikmati.



Dok. www.asiaattraction.com

Chiang Mai adalah kota tua yang terletak di Thailand bagian utara. Kombinasi pemandangan yang aduhai dari barisan pegunungan, sungai dan bangunan kuil menjadi pengingat kekayaan sejarah, seni dan budaya yang terdapat di kota ini menjadi andalan penarik wisatawan ke kota ini. Kota Tua yang dikitari parit berbentuk persegi panjang dan reruntuhan dinding tua yang berada di dalam kota tak kalah menariknya. Pecinta belanja pasti akan suka berjalan-jalan malam hari karena Chiang Mai Night Bazaar memiliki berbagai pilihan toko yang menjual bermacam barang mulai dari pakaian, perhiasan, souvenir, hingga furnitur dan barang antik disepanjang jalan Chang Khlan dan *Loi Khro*. Tidak ketinggalan ada *Doi Suthep national Park* yang banyak dikunjungi turis untuk melihat salah satu tempat suci umat Buddha yang ada di Thailand.

Phuket



Dok. www.asiaattraction.com

Phuket merupakan pulau yang indah berpasir putih yang terletak di Thailand bagian selatan. Untuk menuju ke Phuket dari Bangkok, turis dapat memilih menggunakan moda transportasi pesawat terbang yang ditempuh dalam waktu satu jam, opsi lainnya yaitu menggunakan kereta, maupun bus sesuai dengan kenyamanan. Terdapat 30 pantai yang dapat dipilih turis untuk menghabiskan waktu di Phuket, diantara yang populer yaitu Pantai Patong, Kata, Karon, dan Kamala cocok untuk turis yang ingin merasakan atmosfer yang romantis di Phuket. Untuk makanan, Phuket tidak akan mengecewakan dengan berbagai pilihan masakan tradisional Thailand hingga masakan Asia dapat ditemukan di restoran-restoran.



Dok. www.asiaattraction.com

Krabi



Dok. www.thrillophilia.com/

Krabi terkenal karena pemandangan pantai dan lautnya. Batu karang dan koral yang ada disini termasuk salah satu yang terindah di dunia, membuat Krabi menjadi salah satu tempat favorit untuk diving. Pulau Phi Phi yang terletak tidak jauh dari Phuket sebenarnya juga berada di Provinsi Krabi. Tetapi bila Anda ingin belanja, di sini juga terdapat Krabi memiliki berbagai spot pasar yang dapat dikunjungi baik saat *weekend* maupun *weekdays*, diantaranya krabi town walking street atau yang terkenal dengan ThanonKhon Dern, dan Chao Fah Night Market yang banyak menjajakan street food murah dan barang-barang kerajinan tangan.

Pattaya



Dok. www.dasiatravels.com

Pattaya merupakan kota resor yang terletak di pantai Teluk Thailand, sekitar 100 kilometer sebelah tenggara Bangkok. Di daerah ini terdapat pantai dengan berbagai macam atraksi wisata air. Hotel dan restoran berjajar di pesisir. Hiburan malam seperti bar sampai kedai pijat juga menjadi atraksi para wisatawan disini. Akses untuk berperetualang di sekitar kota juga mudah. Beragam sarana transportasi, bis, van, taksi, juga kapal feri siap melayani.



Dok. www.dasiatravels.com



Dok. www.bangkok.com

Banyaknya atraksi di Thailand menjadikan negara ini bisa optimal memanen wisatawan. Tak heran, Negeri Gajah Putih ini merupakan kontributor terbesar sektor pariwisata di ASEAN. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, total pelancong ke Negeri Gajah Putih pada 2018 sebanyak 38.277.300 orang, meningkat 7,54 persen dari tahun sebelumnya, 35.381.210. Dari total 73.658.510 pengunjung sepanjang 2017-2018, pengunjung dari luar ASEAN sejumlah 54.254.519 orang atau sekitar 73,6 persen, dan 19.403.991 dari kawasan ASEAN

Negara penyumbang wisatawan terbesar ke Thailand adalah Cina, sebanyak 9.805.753 pada 2017 dan 10.535.955 pada 2018. Disusul negara-negara Eropa yang menempati posisi ke-2 dengan kiriman pelancong sekitar 4,05 juta. Rusia mengirim turis sebesar 900.712 orang. Kemudian disusul Asia Selatan (1.133.057) di mana India adalah penyumbang terbesar, sebanyak 919.130 orang. Baru kemudian Amerika (948.872), Oceania (532.296), Timur Tengah (432.054) dan Afrika (106.394).



Dok. www.bangkok.com

Tak heran, pariwisata sangat besar kontribusinya bagi perekonomian Thailand. Pada 2017, sektor pariwisata menyumbang 9.4 persen dari total GDP dan memberikan 2.336.500 pekerjaan. Pada 2020, pemerintah Thailand memproyeksikan jumlah wisatawan yang berkunjung akan naik menjadi sekitar 40 juta orang. Tentunya ini akan menjadi potensi ekonomi yang besar, tidak hanya bagi Thailand, tapi juga bagi ASEAN.

Negara-negara ASEAN lain pun ingin ingin nunut menikmati berkah pariwisata Thailand. ASEAN Tourism Forum (ATF) 2019 yang digelar pada 14-18 Januari 2019 di Vietnam, merupakan forum regional untuk mempromosikan kawasan ASEAN untuk menjadi tujuan pariwisata tunggal dan menjadi kawasan wisata yang menarik dan kompetitif di Asia.

Dengan ATF 2019, diharapkan wisatawan manca negara yang berasal dari kawasan ASEAN dapat bertambah karena meningkatnya konektivitas antar negara ASEAN dan semakin terintegrasinya sistem dan aturan yang berlaku. Integrasi kawasan pariwisata lewat ATF 2019 ini juga berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dari luar ASEAN dengan kawasan pariwisata yang terunifikasi dan packaging yang lebih menarik.

Oleh :
Haykal Yusa
Annisya Khairati
(Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN)

PARIWISATA DI Thailand

Chiang Mai

Kota tua yang terletak di utara cocok untuk turis yang ingin merasakan pemandangan dan kekayaan budaya. The Old City, Chiang Mai Night Bazaar, dan Doi Suthep sangat menarik untuk dikunjungi.

สวัสดี!
(hello!)

Pattaya

Dikelilingi berbagai macam wisata air, hotel & restoran. Hiburan malam juga menjadi atraksi para wisatawan. Turis yang mengunjungi Pattaya sangat dimanjakan dengan alternatif pilihan transportasi yang memadai.

Bangkok

Ibukota dari Thailand yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di dunia. Atraksi di Bangkok meliputi bangunan bersejarah, tempat belanja, dan wisata kuliner.

Phuket

Pulau yang terletak di Thailand bagian selatan ini sudah tidak asing bagi kebanyakan wisatawan. Pantai yang indah serta patung Big Buddha yang terletak di atas bukit merupakan daya tarik tersendiri dari daerah ini.

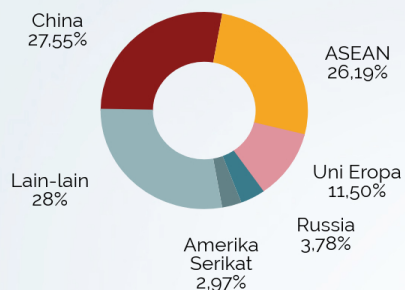
Krabi

Krabi terkenal karena pemandangan pantai dan lautnya yang indah. Batu karang dan koral yang ada disini termasuk salah satu yang terindah di dunia, membuat Krabi menjadi salah satu tempat favorit untuk diving.

Sektor pariwisata menyumbang



Persentase Turis dilihat dari Kawasan dan Negara Asal



Pada **2020**
Pemerintah Thailand
memproyeksikan
jumlah wisatawan
naik menjadi
±40 juta orang



**DUTA MUDA
ASEAN
INDONESIA 2017**



Westra Tanribali
DKI Jakarta

Scholastica Asyana
DI, Yogyakarta



Muzali Maherul
Aceh



Aqilah Nada Fitri
Aceh



Anak Agung Mia I
Bali



Muhammad Ammar
Bangka Belitung



Andika Wahyu
Bengkulu



Putri Cempaka Sari
Bengkulu



Titin Sri Utami
Jambi



Julissa Hasan
Jawa Barat



Aloysius Efraim
Jawa Barat



Achmad Fathoni W.
Bali



Hagi Mulya
Banten



Jessica Natalio
Banten



Gilbert Renaldi K.
DI, Yogyakarta



Alia Silooy
DKI Jakarta



Andre Pawira
Jambi



Alexandro Daniel M.
Jawa Tengah



Haibati Haira
Jawa Tengah



Maaruf Hanuraga
Jawa Timur



Vivin Kartika Sari
Jawa Timur



Vuzza Ajeng
Jawa Timur



Aidi Andani
Kalimantan Barat



Westra Tanribali
DKI Jakarta



Scholastica Asyana
DI, Yogyakarta



Muhammad Bilal
Kepulauan Riau



Selly Febrius
Kepulauan Riau



Yenni Erhawati
Lampung



Venny Gracelia
Makassar



Fatmawati
Kalimantan Selatan



Staza Dwi Fanurni
Kalimantan Timur



Sarinah
Kalimantan Utara



Westra Tanribali
DKI Jakarta



Scholastica Asyana
DI, Yogyakarta



Farizky Arif
Lampung



Daniel Arelidy
Makassar



Venny Gracelia
Makassar



Venny Gracelia
Makassar



Lutfiya Al-Qarani
Nusa Tenggara Barat



Yuliana Nike
Nusa Tenggara Timur



Yuliana Pitormela
Papua



Daran Rizalti
Surabaya Barat



Annisa Utami
Sumatera Barat



Muhammad Ikhsan
Sumatera Selatan



Alifah Putri S.
Sumatera Barat



Yudha Nggara
Sumatera Barat



Benny Putra Pratama
Sumatera Selatan



Salia Uriepa
Papua Barat



Equilibrium T.
Riau



Chassani Feta
Riau



Mochammad Arief
Sumatera Tengah



Jialy Bagensa
Sumatera Utara



Mimiyanti Y.
Sumatera Utara



Dwi Sarastika
Sumatera Selatan



Suci Apriani
Sumatera Utara



Wilda Sinaga
Sumatera Utara

ICONAS 2019



Pemuda Islam Katalisator Toleransi di ASEAN



Peserta Program Jenesys di Jepang





DUTA MUDA
ASEAN 2017





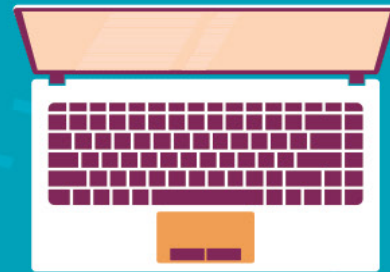


DIREKTORAT JENDERAL
KERJA SAMA ASEAN
MENGUCAPKAN

“ SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA
RAMADHAN 1440 H ”

MAJALAH MASYARAKAT ASEAN GOES DIGITAL

Majalah Masyarakat ASEAN
hadir dalam format digital
yang dapat diakses melalui :



[http : //setnas-asean.id/](http://setnas-asean.id/)

SITUS KEMENTRIAN

Ketik “ Majalah Masyarakat ASEAN “ pada kolom “ cari atau search “

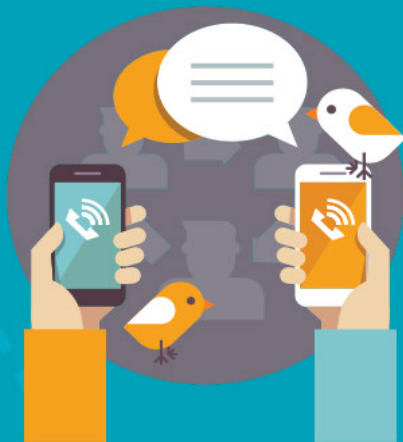
Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin anda baca

SITUS SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

Cari menu “referensi” dan pilih “Majalah Masyarakat ASEAN”

Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin anda baca

Aplikasi Google Play



Pilih menu Books dan ketik “ Ditjen kerja Sama ASEAN “ pada kolom pencarian klik edisi Majalah ASEAN yang kalian ingin baca

Media Sosial



@majalah_masyarakat_asean
@aseanadalahkita
FB : AyokenaliASEAN